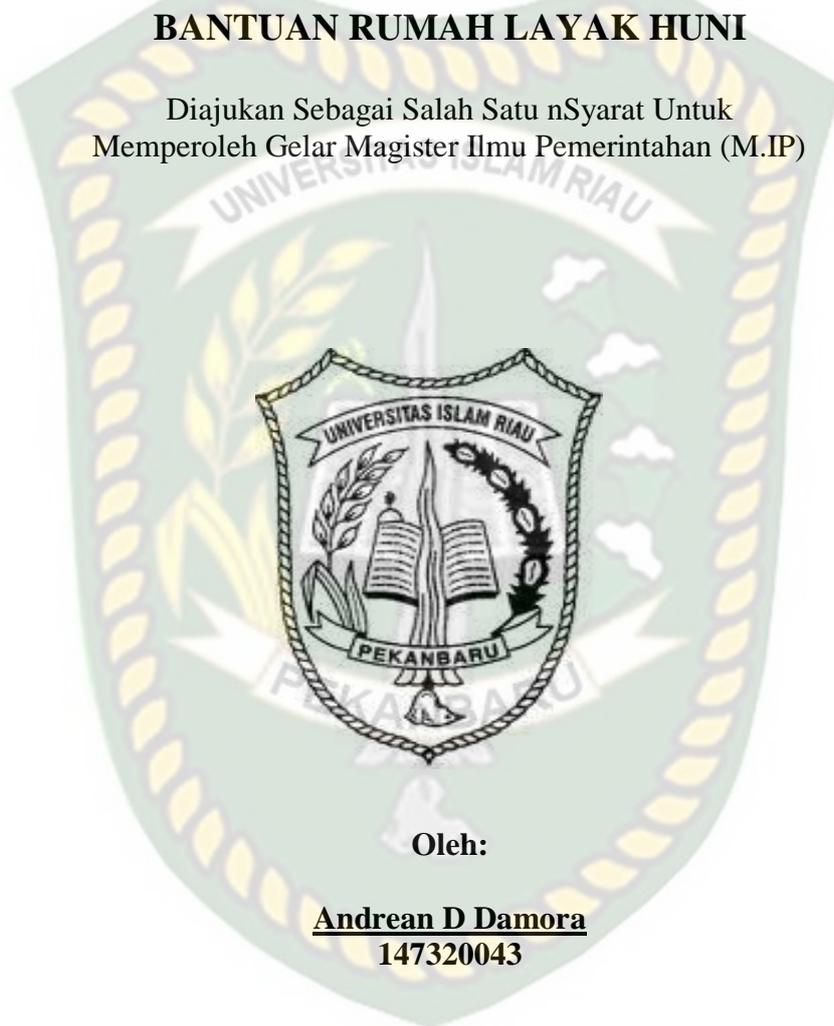


# TESIS

## EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Diajukan Sebagai Salah Satu nSyarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)



Oleh:

**Andrean D Damora**  
**147320043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2018**

## EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Nama : Andrean D Damora  
NPM : 147320043

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan yaitu teori evaluasi menurut Taliziduhu Ndraha yang mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis secara deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian. Hasil penelitian pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Kampar tentang Bantuan Rumah Layak Huni yang dilakukan pada penelitian ini adalah “CUKUP BAIK” dengan persentase jawaban responden sebesar 54,7%. Adapun faktor hambatan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar yaitu: a) Minimnya anggaran dalam Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar membuat program ini kurang maksimal b) Hambatan jarak tempuh tempat pembangunan, dan ketersediaan bahan dalam pembangunan rumah layak huni; c) Hambatan teknis pembangunan rumah; d) Hambatan lemahnya proses pengawasan dalam pelaksanaan program baik dalam proses penyaluran dana maupun dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni; dan e) Hambatan belum adanya sinergitas antara Dinas-Dinas terkait dalam meningkatkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Saran untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Layak Huni yaitu 1) Anggaran perlu di tingkatkan lagi agar rumah terealisasi dengan baik; 2) memberikan fasilitas kendaraan operasional untuk mengantisipasi ketidaktepatan waktu pembangunan, sehingga bisa mempercepat proses pembangunan rumah layak huni; 3) Dalam pengadaan bahan material dan alat-alat bangunan pemerintah bisa membantu dalam pengadaannya; 4) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; 5) kerjasama antar dinas pemerintahan secara terpadu; 6) Tujuan program perlu lebih diperjelas dan dispesifikan; 7) Perlu adanya verifikasi penerima bantuan Rumah Layak Huni dari pihak Pemerintah Desa, Kecamatan maupun tokoh masyarakat setempat, agar pelaksanaan program ini selalu tepat sasaran; dan 8) Perlunya dilakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

**Kata Kunci : Evaluasi, Program Pemerintah, Bantuan Rumah Layak Huni**

## **IMPLEMENTATION EVALUATION PROGRAM OF GOVERNMENT KAMPAR DISTRICT ABOUT HOUSE WORTH LIVEABLE**

**Name : Andrean D Damora**  
**NPM : 147320043**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to evaluate the implementation of the Government Program Kampar About Home Livable and know obstacles in its implementation. The theory is the theory of evaluation used by Taliziduhu Ndraha saying that the evaluation is a comparison between a standard process with the facts and analyzing the results. The method used in this research is quantitative data collection techniques using questionnaires, interviews, observation and documentation. Once the necessary data collected in the study, the data were grouped according to each variable and its indicators. Then the data is analyzed quantitatively incorporating data is the percentage (%) The following explanation and analyzed descriptively that will be depicted in the form of tables and descriptions. The results of the research program Kampar regency government about the Help House Livable conducted in this study is "GOOD ENOUGH" with a percentage of 54.7% of respondents. The resistance factor in the implementation of appropriate housing assistance program in Kampar regency, namely: a) The lack of a budget in the House Livable Program In Kampar make the program less than the maximum; b) Barriers mileage construction site, and the availability of materials in the construction of appropriate housing; c) technical barriers housing construction; d) Barriers weak regulatory process in the implementation of the program both in the process of disbursement of funds and the implementation of appropriate housing construction; And e) Barriers lack of synergy between the Offices involved in maningkatkan sustainable residential development. Suggestions for the implementation of the program Help Home Livable: 1) Budget needs to be increased again in order to house realized well; 2) provides facilities operational vehicles to anticipate inaccuracies development time and thus accelerate the process of building appropriate housing; 3) In the procurement of materials and building tools the government can assist in the procurement; 4) monitoring and evaluation should be carried out periodically; 5) cooperation among government agencies in an integrated manner; 6) The program's objectives need to be further clarified and is specified; 7) It is necessary to verify beneficiaries Livable house of the village government, District and local community leaders, so that the implementation of this program is always right on target; and 8) the need to do for economic empowerment of the beneficiaries of appropriate housing.*

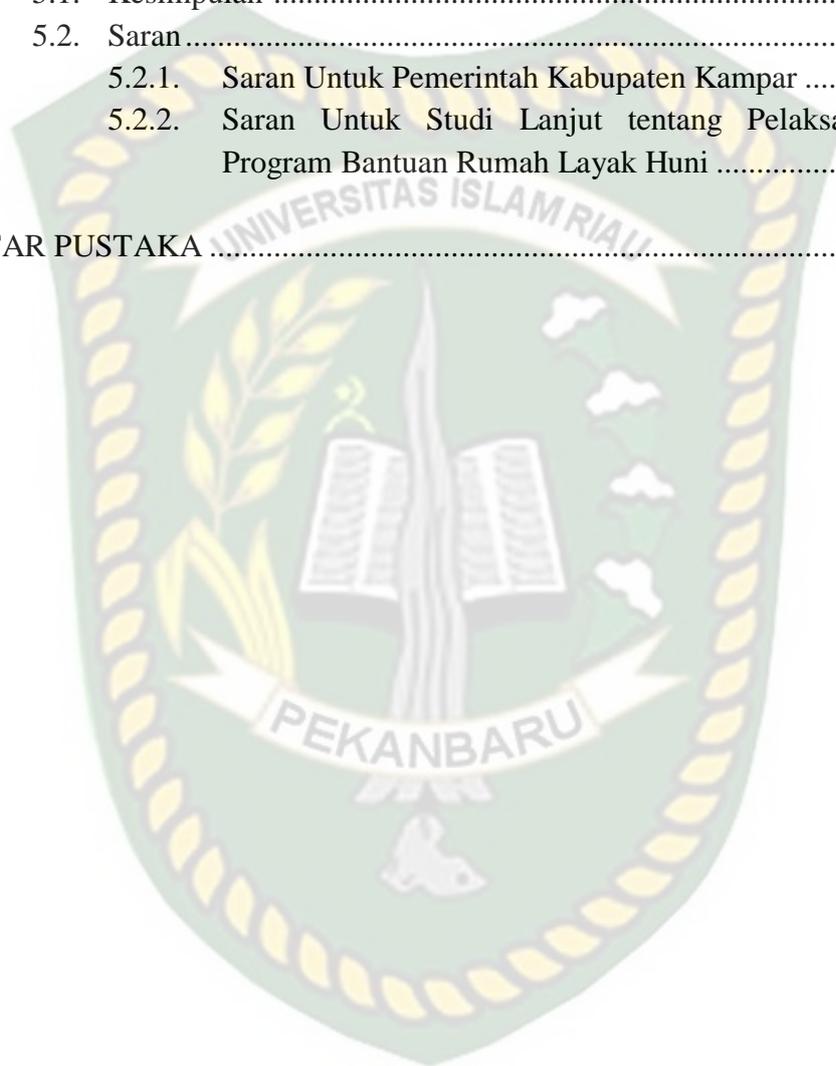
**Keywords : Evaluation , Government Programs , Help House Livable**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Lampiran.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Batasan Masalah.....	15
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	16
1.4.2. Kegunaan Penelitian .....	16
BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Pemerintahan .....	17
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah .....	20
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah .....	25
2.1.4 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	29
2.1.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	33
2.1.6 Fungsi Pemerintahan .....	35
2.1.7 Konsep Manajemen Pemerintahan .....	38
2.1.8 Evaluasi .....	46
2.1.9 Konsep Kebijakan.....	49
2.1.10 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	53
2.1.11 Kemiskinan .....	56
2.2. Penelitian Terdahulu.....	63
2.3. Kerangka Pemikiran .....	64
2.4. Hipotesis .....	65
2.5. Konsep Operasional .....	65
2.6. Operasional Variabel .....	66
2.7. Teknik Pengukuran .....	68

BAB III METODE PENELITIAN .....	71
3.1 Tipe Penelitian .....	71
3.2 Lokasi Penelitian .....	71
3.3 Populasi dan Sampel .....	72
3.4 Teknik Penarikan Sampel .....	73
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	75
3.7 Teknik Analisis Data .....	77
3.8 Sistematika Penulisan .....	77
3.9 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	79
 BAB IV HASIL PENELITIAN .....	 80
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	80
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	80
4.1.2. Keadaan Geografi.....	81
4.1.3. Pemerintahan.....	83
4.2. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar .....	87
4.3. Rekapitulasi Data Responden.....	91
4.3.1. Idenitas Responden .....	91
4.3.1.1. Jenis Kelamin.....	91
4.3.1.2. Usia Responden .....	92
4.3.1.3. Pendidikan Responden.....	94
4.3.1.4. Masa Kerja Responden Pegawai.....	95
4.3.2. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar.....	96
4.3.2.1. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	96
4.3.2.2. Keadaan Rumah Sebelum Pelaksanaan Program.....	97
4.3.2.3. Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	98
4.3.2.4. Dampak yang dirasakan masyarakat setelah pelaksanaan program .....	99
4.4. Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	100
4.4.1. Dukungan Sumber Daya .....	100
4.4.2. Mekanisme Pelaksanaan.....	107
4.4.3. Sasaran, Waktu dan Mutu .....	116
4.4.4. Keberlanjutan Manfaat.....	120

4.5. Hambatan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	128
BAB V PENUTUP.....	130
5.1. Kesimpulan .....	130
5.2. Saran.....	132
5.2.1. Saran Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar .....	132
5.2.2. Saran Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	135



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Jumlah Rumah Sederhana Layak Huni Menurut Kecamatan dari Tahun 2011-2014.....	12
Tabel II.1	: Penelitian terdahulu tentang bantuan rumah layak huni .....	63
Tabel II.2	: Operasional Variabel Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	67
Tabel III.1	: Populasi dan Sampel .....	72
Tabel III.2	: Rancangan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	79
Tabel IV.1	: Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	82
Tabel IV.2	: Jumlah Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Non Tertinggal Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	84
Tabel IV.3	: Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	85
Tabel IV.4	: Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	86
Tabel IV.5	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan.....	89
Tabel IV.6	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
Tabel IV.7	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Umur.....	93
Tabel IV.8	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	94
Tabel IV.9	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja Pegawai .....	95

Tabel IV.10 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan.....	96
Tabel IV.11 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni .....	97
Tabel IV.12 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	98
Tabel IV.13 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan dampak yang dirasakan Terhadap Pelaksanaan Program.....	99
Tabel IV.14 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Didukung sumber daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	100
Tabel IV.15 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Didukung sumber daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	101
Tabel IV.16 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	107
Tabel IV.17 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	108
Tabel IV.18 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan.....	111
Tabel IV.19 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni .....	112

Tabel IV.20 :	Pembiayaan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni Kabupaten Kampar.....	115
Tabel IV.21 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	116
Tabel IV.22 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	117
Tabel IV.23 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	120
Tabel IV.24 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	121
Tabel IV.25 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	122
Tabel IV.26 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	125
Tabel IV.27 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden(Masyarakat) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	126
Tabel IV.28 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar .....	64
Gambar IV.1 : Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar.....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuisisioner Penelitian Responden Pegawai.....	138
Lampiran 2	: Kuisisioner Penelitian Responden Masyarakat.....	141
Lampiran 3	: Daftar Panduan Observasi.....	148
Lampiran 4	: Daftar Telly (Responden Pegawai) Penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	149
Lampiran 5	: Daftar Telly (Responden Masyarakat) Penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	150
Lampiran 6	: Tabel Krecjie untuk Menentukan Ukuran Sampel Minimum pada Taraf Signifikansi 0,01 (1%); 0,05 (5%); dan 0,10 (10%).....	154
Lampiran 7	: Dokumentasi/ Foto Penelitian.....	155
Lampiran 8	: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Nomor: 038/UIR/KPTS/PS-IP/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.....	161
Lampiran 9	: Surat Rekomendasi Universitas Islam Riau Program Pascasarjana Nomor 569/E-UIR/27-PPS/2016 Tentang Penelitian.....	162
Lampiran 10	: Surat Rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor 503/BP2T-IR/2016/10922 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis.....	163
Lampiran 11	: Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor 070/KKBP/2016/670 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis.....	164
Lampiran 12	: Surat Keterangan Riset Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Nomor 973/CKTR-SET/2016/017.....	165

Lampiran 13	: Surat Keterangan Penelitian Riset/ Pra Riset Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor 070/Sekrt-GS/098 .....	166
Lampiran 14	: Surat Keterangan Penelitian Riset/ Pra Riset Kecamatan Gunung Sahilan Nomor 070/Sekrt-GS/097.....	167
Lampiran 15	: Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor 071/Kessos/2016/14 .....	168
Lampiran 16	: Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 600/CKTR-SET/2015/1598 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 .....	169
Lampiran 17	: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rumah Layak Huni atas nama Rumah Ibu Nurmi.....	178
Lampiran 18	: Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni .....	189

## EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Nama : Andrean D Damora  
NPM : 147320043

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan yaitu teori evaluasi menurut Taliziduhu Ndraha yang mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis secara deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian. Hasil penelitian pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Kampar tentang Bantuan Rumah Layak Huni yang dilakukan pada penelitian ini adalah “CUKUP BAIK” dengan persentase jawaban responden sebesar 54,7%. Adapun faktor hambatan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar yaitu: a) Minimnya anggaran dalam Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar membuat program ini kurang maksimal b) Hambatan jarak tempuh tempat pembangunan, dan ketersediaan bahan dalam pembangunan rumah layak huni; c) Hambatan teknis pembangunan rumah; d) Hambatan lemahnya proses pengawasan dalam pelaksanaan program baik dalam proses penyaluran dana maupun dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni; dan e) Hambatan belum adanya sinergitas antara Dinas-Dinas terkait dalam meningkatkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Saran untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Layak Huni yaitu 1) Anggaran perlu di tingkatkan lagi agar rumah terealisasi dengan baik; 2) memberikan fasilitas kendaraan operasional untuk mengantisipasi ketidaktepatan waktu pembangunan, sehingga bisa mempercepat proses pembangunan rumah layak huni; 3) Dalam pengadaan bahan material dan alat-alat bangunan pemerintah bisa membantu dalam pengadaannya; 4) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik; 5) kerjasama antar dinas pemerintahan secara terpadu; 6) Tujuan program perlu lebih diperjelas dan dispesifikan; 7) Perlu adanya verifikasi penerima bantuan Rumah Layak Huni dari pihak Pemerintah Desa, Kecamatan maupun tokoh masyarakat setempat, agar pelaksanaan program ini selalu tepat sasaran; dan 8) Perlunya dilakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

**Kata Kunci : Evaluasi, Program Pemerintah, Bantuan Rumah Layak Huni**

**IMPLEMENTATION EVALUATION PROGRAM OF GOVERNMENT  
KAMPAR DISTRICT ABOUT HOUSE WORTH LIVEABLE**

**Name : Andrean D Damora  
NPM : 147320043**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to evaluate the implementation of the Government Program Kampar About Home Livable and know obstacles in its implementation. The theory is the theory of evaluation used by Taliziduhu Ndraha saying that the evaluation is a comparison between a standard process with the facts and analyzing the results. The method used in this research is quantitative data collection techniques using questionnaires, interviews, observation and documentation. Once the necessary data collected in the study, the data were grouped according to each variable and its indicators. Then the data is analyzed quantitatively incorporating data is the percentage (%) The following explanation and analyzed descriptively that will be depicted in the form of tables and descriptions. The results of the research program Kampar regency government about the Help House Livable conducted in this study is "GOOD ENOUGH" with a percentage of 54.7% of respondents. The resistance factor in the implementation of appropriate housing assistance program in Kampar regency, namely: a) The lack of a budget in the House Livable Program In Kampar make the program less than the maximum; b) Barriers mileage construction site, and the availability of materials in the construction of appropriate housing; c) technical barriers housing construction; d) Barriers weak regulatory process in the implementation of the program both in the process of disbursement of funds and the implementation of appropriate housing construction; And e) Barriers lack of synergy between the Offices involved in maningkatkan sustainable residential development. Suggestions for the implementation of the program Help Home Livable: 1) Budget needs to be increased again in order to house realized well; 2) provides facilities operational vehicles to anticipate inaccuracies development time and thus accelerate the process of building appropriate housing; 3) In the procurement of materials and building tools the government can assist in the procurement; 4) monitoring and evaluation should be carried out periodically; 5) cooperation among government agencies in an integrated manner; 6) The program's objectives need to be further clarified and is specified; 7) It is necessary to verify beneficiaries Livable house of the village government, District and local community leaders, so that the implementation of this program is always right on target; and 8) the need to do for economic empowerment of the beneficiaries of appropriate housing.*

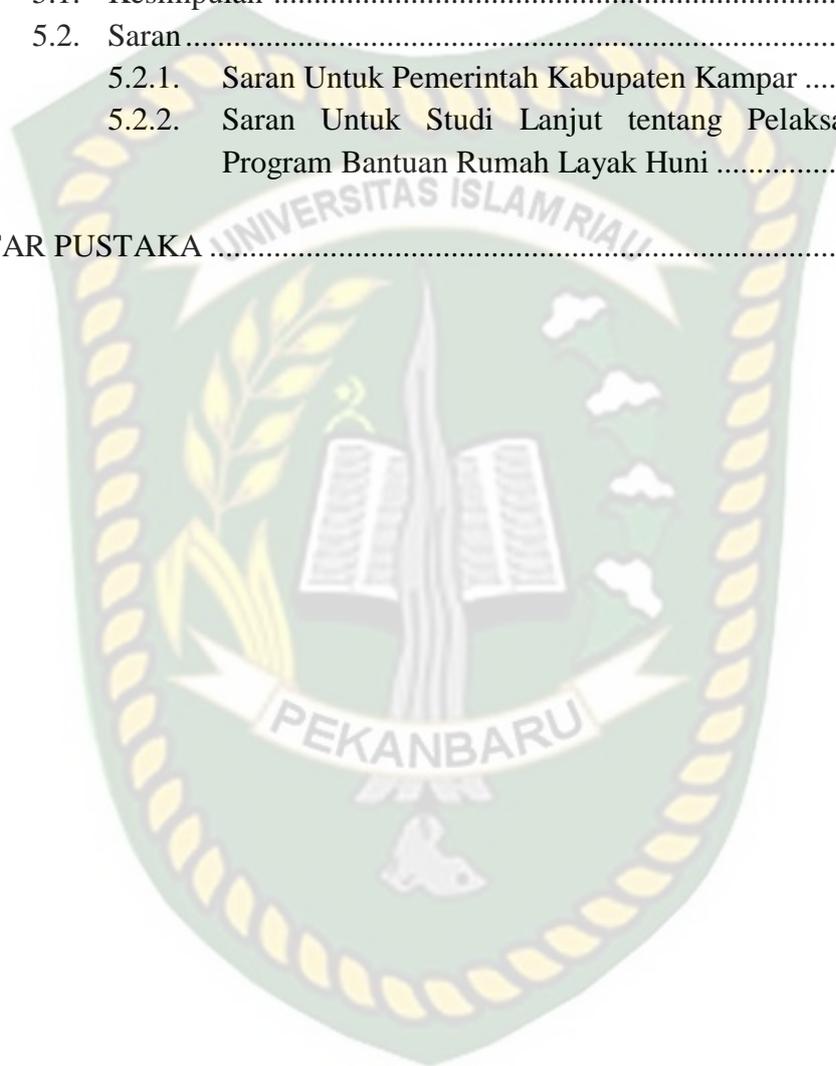
**Keywords : Evaluation , Government Programs , Help House Livable**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Lampiran.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Batasan Masalah .....	15
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	16
1.4.2. Kegunaan Penelitian .....	16
BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Pemerintahan .....	17
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah .....	20
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah .....	25
2.1.4 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	29
2.1.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	33
2.1.6 Fungsi Pemerintahan .....	35
2.1.7 Konsep Manajemen Pemerintahan .....	38
2.1.8 Evaluasi .....	46
2.1.9 Konsep Kebijakan.....	49
2.1.10 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	53
2.1.11 Kemiskinan .....	56
2.2. Penelitian Terdahulu.....	63
2.3. Kerangka Pemikiran .....	64
2.4. Hipotesis .....	65
2.5. Konsep Operasional .....	65
2.6. Operasional Variabel .....	66
2.7. Teknik Pengukuran .....	68

BAB III METODE PENELITIAN .....	71
3.1 Tipe Penelitian .....	71
3.2 Lokasi Penelitian .....	71
3.3 Populasi dan Sampel .....	72
3.4 Teknik Penarikan Sampel .....	73
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	75
3.7 Teknik Analisis Data .....	77
3.8 Sistematika Penulisan .....	77
3.9 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	80
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	80
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	80
4.1.2. Keadaan Geografi.....	81
4.1.3. Pemerintahan.....	83
4.2. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar .....	87
4.3. Rekapitulasi Data Responden.....	91
4.3.1. Idenitas Responden .....	91
4.3.1.1. Jenis Kelamin.....	91
4.3.1.2. Usia Responden .....	92
4.3.1.3. Pendidikan Responden.....	94
4.3.1.4. Masa Kerja Responden Pegawai.....	95
4.3.2. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar.....	96
4.3.2.1. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	96
4.3.2.2. Keadaan Rumah Sebelum Pelaksanaan Program.....	97
4.3.2.3. Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	98
4.3.2.4. Dampak yang dirasakan masyarakat setelah pelaksanaan program .....	99
4.4. Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	100
4.4.1. Dukungan Sumber Daya .....	100
4.4.2. Mekanisme Pelaksanaan.....	107
4.4.3. Sasaran, Waktu dan Mutu .....	116
4.4.4. Keberlanjutan Manfaat.....	120

4.5. Hambatan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	128
BAB V PENUTUP.....	130
5.1. Kesimpulan .....	130
5.2. Saran.....	132
5.2.1. Saran Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar .....	132
5.2.2. Saran Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	135



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Jumlah Rumah Sederhana Layak Huni Menurut Kecamatan dari Tahun 2011-2014.....	12
Tabel II.1	: Penelitian terdahulu tentang bantuan rumah layak huni .....	63
Tabel II.2	: Operasional Variabel Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	67
Tabel III.1	: Populasi dan Sampel .....	72
Tabel III.2	: Rancangan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	79
Tabel IV.1	: Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	82
Tabel IV.2	: Jumlah Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Non Tertinggal Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	84
Tabel IV.3	: Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	85
Tabel IV.4	: Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	86
Tabel IV.5	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan.....	89
Tabel IV.6	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
Tabel IV.7	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Umur .....	93
Tabel IV.8	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	94
Tabel IV.9	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja Pegawai .....	95

Tabel IV.10 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan.....	96
Tabel IV.11 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni .....	97
Tabel IV.12 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	98
Tabel IV.13 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan dampak yang dirasakan Terhadap Pelaksanaan Program.....	99
Tabel IV.14 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Didukung sumber daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	100
Tabel IV.15 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Didukung sumber daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	101
Tabel IV.16 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	107
Tabel IV.17 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	108
Tabel IV.18 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan.....	111
Tabel IV.19 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni .....	112

Tabel IV.20 :	Pembiayaan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni Kabupaten Kampar.....	115
Tabel IV.21 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	116
Tabel IV.22 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	117
Tabel IV.23 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	120
Tabel IV.24 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	121
Tabel IV.25 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	122
Tabel IV.26 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	125
Tabel IV.27 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden(Masyarakat) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	126
Tabel IV.28 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar .....	64
Gambar IV.1 : Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar.....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuisisioner Penelitian Responden Pegawai.....	138
Lampiran 2	: Kuisisioner Penelitian Responden Masyarakat.....	141
Lampiran 3	: Daftar Panduan Observasi.....	148
Lampiran 4	: Daftar Telly (Responden Pegawai) Penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	149
Lampiran 5	: Daftar Telly (Responden Masyarakat) Penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	150
Lampiran 6	: Tabel Krecjie untuk Menentukan Ukuran Sampel Minimum pada Taraf Signifikansi 0,01 (1%); 0,05 (5%); dan 0,10 (10%).....	154
Lampiran 7	: Dokumentasi/ Foto Penelitian.....	155
Lampiran 8	: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Nomor: 038/UIR/KPTS/PS-IP/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.....	161
Lampiran 9	: Surat Rekomendasi Universitas Islam Riau Program Pascasarjana Nomor 569/E-UIR/27-PPS/2016 Tentang Penelitian.....	162
Lampiran 10	: Surat Rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor 503/BP2T-IR/2016/10922 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis.....	163
Lampiran 11	: Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor 070/KKBP/2016/670 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis.....	164
Lampiran 12	: Surat Keterangan Riset Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Nomor 973/CKTR-SET/2016/017.....	165

Lampiran 13	: Surat Keterangan Penelitian Riset/ Pra Riset Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor 070/Sekrt-GS/098 .....	166
Lampiran 14	: Surat Keterangan Penelitian Riset/ Pra Riset Kecamatan Gunung Sahilan Nomor 070/Sekrt-GS/097.....	167
Lampiran 15	: Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor 071/Kessos/2016/14 .....	168
Lampiran 16	: Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 600/CKTR-SET/2015/1598 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 .....	169
Lampiran 17	: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rumah Layak Huni atas nama Rumah Ibu Nurmi.....	178
Lampiran 18	: Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni .....	189

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah, yang dengan nama-Nya bumi dihamparkan, yang dengan nama-Nya langit ditinggikan. Segala puji bagi Allah Sang Maha Cahaya Penguak Hidayah, yang semua jiwa dalam genggamannya, kasih sayang-Mu nan mulia tak terperi, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmaan, Sang Maha Pengasih.

Shalawat dan salam teruntuk Muhammad Rasulullah SAW, yang telah berjuang sepenuh hati dan jiwa untuk menyampaikan risalah AL-Quran bagi segenap umat manusia. Cintamu pada umat yang tiada tara, sulit terbalaskan. Perjuanganmu nan agung, wahai Nabi yang mulia. Hanya shalawat dan sepercik goresan tinta dalam Tesis ini, mudah – mudahan bisa sedikit membantu perjuanganmu, ya...Rasulullah.

Teruntuk kedua orang tua penulis yang amat sangat penulis cintai, Ayahanda Delvis dan Ibunda Darmirita. Pembimbing sekaligus pendorong semangat penulis. Cintamu yang luhur telah menginspirasi penulis dalam menulis Tesis ini, dan juga dalam kehidupan penulis. Mereka mendidik penulis untuk merdeka dalam mengambil keputusan hidup, hanya Allah yang mampu membalas kebaikanmu yang sangat agung itu. Aminn..

Penulis bersyukur kepada Allah, karena telah diberikan kesempatan menuntut dan mempelajari Ilmu Pengetahuan diperguruan tinggi Universitas

Islam Riau sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Tesis ini berjudul : Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.

Dengan tesis yang sederhana ini penulis telah berupaya dan berusaha untuk menjawab permasalahan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni. Dimana semua uraian masalah penulis dasarkan pada konsepsi teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. teori – teori yang penulis gunakan penulis cari jawabannya secara mendalam dengan melakukan wawancara bebas terpimpin dengan para informan yang terlibat langsung dalam masalah penelitian ini dan dianggap berkompeten dalam memberikan jawaban sehingga diharapkan penelitian ini akan benar- benar dapat memaparkan masalah yang terjadi dan menarik untuk dibaca.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dalam semua penyajiannya. Karena itu penulis harapkan saran serta kritikan yang tentunya mampu menyempurnakan semua kekurangan dari penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aminn.

Dalam penulisan tesis ini penulis tidak terlepas dari bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang telah memberikan jalan, masukan, nasehat, dorongan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis

ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Detri Karya, SE., MA selaku Rektor Universitas Islam Riau semoga pertolongan bapak menjadi amal ibadah.
2. Bapak DR. Ir. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan, masukan, motivasi kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Semoga senantiasa dijaga Allah SWT.
3. Bapak DR, Syafhendri, M.Si selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis, semoga di lindungi Allah SWT.
4. Bapak DR. Nurman, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dari kesibukan serta senantiasa membimbing penulis dengan sabar sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi penulis. Pengarahan – pengarahan yang telah bapak berikan menghasilkan banyak manfaat bagi penulis dalam menganalisa hasil penelitian ini, serta untuk menyempurnakan dan menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah SWT akan senantiasa mencatat amal kebaikan bapak.
5. Bapak Drs. Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam Tesis ini. Bimbingan, masukan, saran serta nasehat yang begitu tulus dan ikhlas telah

memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Dan, terimakasih atas kepercayaan Bapak kepada penulis selama ini. semoga Allah SWT selalu melindungi bapak dan membalas semua kebaikan bapak. Aamiin...

6. Dosen Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Mudah - mudahan arahan serta nasehat dari bapak mampu menjadi penerang bagi kehidupan penulis khususnya serta menjadi kebaikan bagi sesama umumnya. Allah SWT jua lah yang akan membalas semua kebaikan bapak dan senantiasa selalu merengkuh bapak dalam kehangatan lindungannya.
7. Karyawan dan pegawai Tata Usaha Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan semua ilmu pengetahuan yang telah bapak/ibu berikan selama ini, semoga bermanfaat bagi penulis. Mudah – mudahan Allah SWT senantiasa melindungi bapak/ibu semuanya.
8. Teman-teman Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan teman-teman lain yang tidak dapat disebut satu persatu Terimakasih atas bantuan selama ini, serta semua motivasi, dukungan serta pengertian yang tak mungkin bisa penulis gantikan dengan apapun. Semoga Allah SWT mencatat semua amal Kebaikannya serta semoga Allah melindungi dan mengabulkan cita-citamu.

9. Keluarga besar serta kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan selama ini. Semoga selalu dalam Lindungan dan Kasih Sayang Allah SWT.
10. Tidak ketinggalan pula kepada Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Kepala BAPPEDA Kabupaten Kampar, Bapak Camat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Gunung Sahilan, dan Kecamatan XIII Koto Kampar, Kepada semua unsur Pemerintahan Desa dan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) di lokasi penelitian peneliti, serta semua masyarakat penerima bantuan rumah layak huni pada umumnya yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data maupun informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak/ibu.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT agar menerima usaha penulis ini, menjadikannya tabungan amal disisinya serta memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Semoga Kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Hormat Saya; Agustus 2017

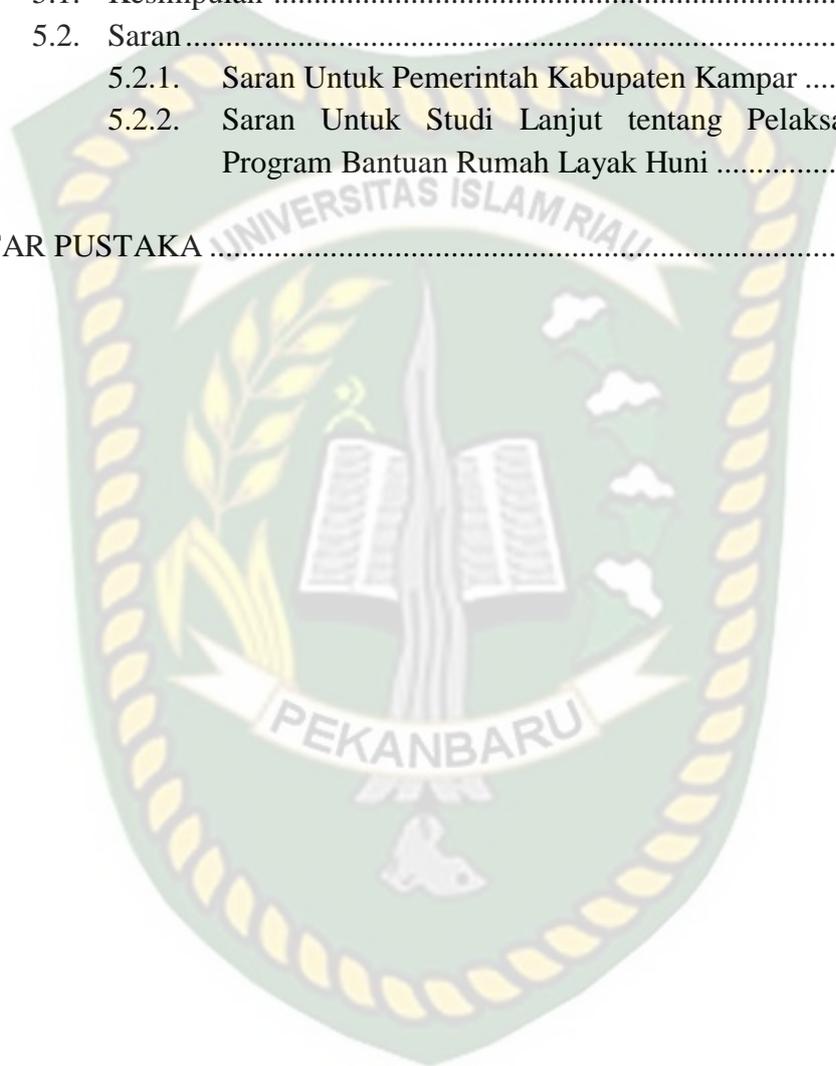
**Andrean D Damora**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Lampiran.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Batasan Masalah .....	15
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	16
1.4.2. Kegunaan Penelitian .....	16
BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Pemerintahan .....	17
2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah .....	20
2.1.3 Konsep Otonomi Daerah .....	25
2.1.4 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	29
2.1.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	33
2.1.6 Fungsi Pemerintahan .....	35
2.1.7 Konsep Manajemen Pemerintahan .....	38
2.1.8 Evaluasi .....	46
2.1.9 Konsep Kebijakan.....	49
2.1.10 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	53
2.1.11 Kemiskinan .....	56
2.2. Penelitian Terdahulu.....	63
2.3. Kerangka Pemikiran .....	64
2.4. Hipotesis .....	65
2.5. Konsep Operasional .....	65
2.6. Operasional Variabel .....	66
2.7. Teknik Pengukuran .....	68

BAB III METODE PENELITIAN .....	71
3.1 Tipe Penelitian .....	71
3.2 Lokasi Penelitian .....	71
3.3 Populasi dan Sampel .....	72
3.4 Teknik Penarikan Sampel .....	73
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	73
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	75
3.7 Teknik Analisis Data .....	77
3.8 Sistematika Penulisan .....	77
3.9 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	80
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	80
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar .....	80
4.1.2. Keadaan Geografi.....	81
4.1.3. Pemerintahan.....	83
4.2. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar .....	87
4.3. Rekapitulasi Data Responden.....	91
4.3.1. Idenitas Responden .....	91
4.3.1.1. Jenis Kelamin.....	91
4.3.1.2. Usia Responden .....	92
4.3.1.3. Pendidikan Responden.....	94
4.3.1.4. Masa Kerja Responden Pegawai.....	95
4.3.2. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar.....	96
4.3.2.1. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	96
4.3.2.2. Keadaan Rumah Sebelum Pelaksanaan Program.....	97
4.3.2.3. Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	98
4.3.2.4. Dampak yang dirasakan masyarakat setelah pelaksanaan program .....	99
4.4. Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	100
4.4.1. Dukungan Sumber Daya .....	100
4.4.2. Mekanisme Pelaksanaan.....	107
4.4.3. Sasaran, Waktu dan Mutu .....	116
4.4.4. Keberlanjutan Manfaat.....	120

4.5. Hambatan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	128
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	130
5.1. Kesimpulan .....	130
5.2. Saran .....	132
5.2.1. Saran Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar .....	132
5.2.2. Saran Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	135



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Jumlah Rumah Sederhana Layak Huni Menurut Kecamatan dari Tahun 2011-2014.....	12
Tabel II.1	: Penelitian terdahulu tentang bantuan rumah layak huni .....	63
Tabel II.2	: Operasional Variabel Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	67
Tabel III.1	: Populasi dan Sampel .....	72
Tabel III.2	: Rancangan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni .....	79
Tabel IV.1	: Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	82
Tabel IV.2	: Jumlah Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Non Tertinggal Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	84
Tabel IV.3	: Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	85
Tabel IV.4	: Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	86
Tabel IV.5	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan.....	89
Tabel IV.6	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	92
Tabel IV.7	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Umur.....	93
Tabel IV.8	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	94
Tabel IV.9	: Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja Pegawai .....	95

Tabel IV.10 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan.....	96
Tabel IV.11 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni .....	97
Tabel IV.12 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	98
Tabel IV.13 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan dampak yang dirasakan Terhadap Pelaksanaan Program.....	99
Tabel IV.14 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Didukung sumber daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	100
Tabel IV.15 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Didukung sumber daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	101
Tabel IV.16 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	107
Tabel IV.17 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	108
Tabel IV.18 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan.....	111
Tabel IV.19 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni .....	112

Tabel IV.20 :	Pembiayaan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni Kabupaten Kampar.....	115
Tabel IV.21 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	116
Tabel IV.22 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	117
Tabel IV.23 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	120
Tabel IV.24 :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	121
Tabel IV.25 :	Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program.....	122
Tabel IV.26 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	125
Tabel IV.27 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden(Masyarakat) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	126
Tabel IV.28 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar .....	64
Gambar IV.1 : Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar.....	90



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kuisisioner Penelitian Responden Pegawai.....	138
Lampiran 2	: Kuisisioner Penelitian Responden Masyarakat.....	141
Lampiran 3	: Daftar Panduan Observasi.....	148
Lampiran 4	: Daftar Telly (Responden Pegawai) Penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	149
Lampiran 5	: Daftar Telly (Responden Masyarakat) Penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.....	150
Lampiran 6	: Tabel Krecjie untuk Menentukan Ukuran Sampel Minimum pada Taraf Signifikansi 0,01 (1%); 0,05 (5%); dan 0,10 (10%).....	154
Lampiran 7	: Dokumentasi/ Foto Penelitian.....	155
Lampiran 8	: Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Nomor: 038/UIR/KPTS/PS-IP/2016 Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.....	161
Lampiran 9	: Surat Rekomendasi Universitas Islam Riau Program Pascasarjana Nomor 569/E-UIR/27-PPS/2016 Tentang Penelitian.....	162
Lampiran 10	: Surat Rekomendasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor 503/BP2T-IR/2016/10922 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis.....	163
Lampiran 11	: Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor 070/KKBP/2016/670 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Tesis.....	164
Lampiran 12	: Surat Keterangan Riset Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Nomor 973/CKTR-SET/2016/017.....	165

Lampiran 13	: Surat Keterangan Penelitian Riset/ Pra Riset Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor 070/Sekrt-GS/098 .....	166
Lampiran 14	: Surat Keterangan Penelitian Riset/ Pra Riset Kecamatan Gunung Sahilan Nomor 070/Sekrt-GS/097.....	167
Lampiran 15	: Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor 071/Kessos/2016/14 .....	168
Lampiran 16	: Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 600/CKTR-SET/2015/1598 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 .....	169
Lampiran 17	: Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rumah Layak Huni atas nama Rumah Ibu Nurmi.....	178
Lampiran 18	: Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni .....	189

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 ialah: “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan negara keberadaan pemerintah tidak dapat dipisahkan karena fungsi pemerintah adalah menjalankan roda pemerintahan di dalam negara tersebut. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” yaitu, ada dua pihak yang terkandung di dalamnya, kedua

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>2</sup>

Apabila dalam suatu negara, kekuasaan pemerintahan dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).<sup>3</sup>

Guna untuk mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 maka dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Keadaan ini sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yang mengatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia diibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiao provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang daitur dengan Undang-Undang”.

Hal ini disebabkan karena terlalu luasnya wilayah Negara Republik Indonesia ini, pemerintah tidak akan mungkin bisa mengurus setiap sudut daerah Indonesia ini, serta alasan lainnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan demokrasi di daerah, maka diperlukanlah pemerintahan daerah. Pada saat ini jumlah daerah yang ada di Indonesia baik provinsi, kabupaten/kota, dan desa

---

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafii. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Rafika Aditama. Bandung, Hal. 20

<sup>3</sup> Ibid

adalah sebanyak 33 provinsi, 349 kabupaten, 91 kota, 5.263 kecamatan, 7.123 kelurahan, dan 62.806 desa.<sup>4</sup>

Untuk mengimplementasikan pasal 18 UUD RI Tahun 1945, maka dibuatlah Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ini maka telah memberikan harapan besar bagi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi disetiap daerah.

Agar masing-masing daerah dapat mengerjakan urusan-urusan pemerintahan, maka melalui pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2

---

<sup>4</sup> <http://www.depdagri.go.id>. Di akses tanggal 12 Oktober 2015, 16:30 wib.

bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum , penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah social.

Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah .

Dari pembagian urusan pemerintah dan daerah di atas, salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diberikan kepada daerah adalah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bagi masyarakat miskin.

Bicara tentang kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 total persentase penduduk miskin adalah 11,25% dari total penduduk, telah naik sebesar 0,12% dari Maret 2013 dengan persentase 11,37% dari total penduduk. Data tersebut jika kita cermati dari periode tahun 2005 s.d 2011 pada prinsipnya telah membawa ke arah kebaikan yang cukup signifikan. Tahun 2005 penduduk miskin sebesar 15,97% dari seluruh

penduduk Indonesia, tahun 2006 meningkat menjadi 17,75%, tahun 2007 menjadi 16,58%, tahun 2008 sebesar 15,42%, tahun 2009 turun sebesar 14,15%, tahun 2010 sebesar 13,33%, dan pada tahun 2011 kemiskinan turun lagi menjadi 12,49%.<sup>5</sup> Penurunan yang cukup berarti tentunya dari tahun 2011 ke tahun 2014 hingga kemiskinan menjadi 11,25%. Akan tetapi jika dicermati dengan baik angka tersebut masih tergolong relatif tinggi dari harapan yang diinginkan minimal dibawah 8%.

Di Provinsi Riau hingga Maret 2015, kemiskinan telah berkisar pada angka 8,12%, sedikit mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari Maret 2013 yang berjumlah 7,72% dari total penduduk. Data tersebut jika dibandingkan dengan data kemiskinan di Kabupaten Kampar masih jauh dari harapan. Survey tahun 2011 masih tercatat jumlah angka kemiskinan sebesar 12,05% dari total penduduk di Kabupaten Kampar. Pemerintah menargetkan hingga tahun 2015 ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Kampar turun hingga mencapai menjadi 8%, atau rata-rata setiap tahunnya kemiskinan diupayakan turun 1%.<sup>6</sup>

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini tidaklah sedikit, persoalan ini telah menjadi tanggung jawab seluruh bidang-bidang kementerian RI. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kampar melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara:

1. Menyelenggarakan 5 (lima) pilar pembangunan Kabupaten Kampar yaitu:

---

<sup>5</sup> BPS dalam Istiana, 2011, *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. B2P3KS PRESS, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Rakor Penanggulangan Kemiskinan, 2012.

- a. Peningkatan akhlak dan moral;
  - b. Meningkatkan ekonomi rakyat;
  - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia;
  - d. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
  - e. Meningkatkan infrastruktur.
2. Menyediakan rumah yang layak dihuni bagi masyarakat miskin.
- a. Meningkatkan peran serta masyarakat;
  - b. Memberi peluang kerja bagi masyarakat dalam kegiatan konstruksi;
  - c. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan perumahan.

Salah satu upaya nyata Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Kampar adalah melalui pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kondisi rumah tempat tinggalnya sangat memprihatinkan, sementara mereka sendiri tidak mampu melakukan perbaikan. Program ini sendiri mulai dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada tahun 2007.<sup>7</sup>

Dalam rangka pemenuhan hak dasar untuk tempat tinggal dan lingkungan yang layak sesuai dengan UUD RI Tahun 1945 pasal 28H, pemerintah telah memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta memberikan dukungan penyediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman, seperti air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Kriteria kawasan pemukiman yang ditetapkan di Kabupaten Kampar adalah; berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016, Hal. IV-21

kegiatan masyarakat di luar kawasan, memiliki kelengkapan prasarana dan utilitas pendukung.

Sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga maka dimatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 2 asas penanganan fakir miskin terdiri dari kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan. Di bab II dijelaskan pula mengenai hak dan tanggung jawab fakir miskin. Diantaranya fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan sosial, derajat keidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, serta pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengentaskan kemiskinan tersebut adalah dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar. Adapun pelaksanaan penangan fakir miskin dalam perda ini adalah dengan merumuskan program-program bantuan bagi fakir miskin. Pasal 15 dalam perda ini menyatakan program penanganan fakir miskin meliputi: a) bantuan pangan; b) bantuan kesehatan; c) bantuan pendidikan; d) bantuan perumahan; e) bantuan peningkatan keterampilan; dan f) bantuan modal usaha.

Rumah merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan sandang yang masih belum dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat. Ketidak mampuan masyarakat miskin untuk mendapat rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan yang responsif (sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan). Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses terhadap sumber daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan.<sup>8</sup>

Sebagai turunan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tersebut disahkan Peraturan Bupati Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni menyebutkan kriteria penerima hibah rumah sederhana sehat/ rumah layak huni yaitu:

- a. Data KK miskin yang memiliki rumah tidak sehat dan atau belum memiliki rumah, yang merupakan hasil dari usulan Kepala Desa/ Kelurahan;
- b. Memiliki rumah yang tidak layak huni (atap rumbia, dinding kulit kayu, rumah reot dan lain-lain) atau belum memiliki rumah;
- c. Memiliki tanah sendiri, hibah. Dari ahli waris berupa surat status tanah dari kepala desa;
- d. Keluarga yang tidak mampu dan tidak mempunyai mata pencarian yang tetap dan memiliki tanggung jawab keluarga;
- e. Janda yang masih memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun);

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-ET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2015, Latar Belakang.

- f. Keluarga lengkap atau duda dengan tanggungan banyak (anak-anak dibawah umur 13 tahun);
- g. Kepala keluarga cacat tetap dan memiliki tanggungan keluarga (anak-anak dibawah umur 13 tahun).
- h. Tidak memiliki penghasilan tetap, masyarakat berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah layak huni ini, didukung oleh struktur organisasi penyelenggaraan yang menggambarkan pola penanganan program secara menyeluruh dari tingkat kabupaten sampai ketingkat masyarakat dengan melibatkan komponen-komponen pelaksana dan instansi terkait lainnya.

Ditingkat kabupaten komponen yang terlibat dalam pembangunan rumah layak huni adalah:

A. Pemerintah Kabupaten

- 1. Pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di Kabupaten Kampar.
- 2. Bupati bertugas mengkoordinasi penyelenggaraan program pembangunan rumah layak huni di wilayah kerjanya.
- 3. Bupati bertugas membentuk Tim Teknis Perumahan.

B. Tim Teknis Perumahan (TTP)

- 1. Tim Teknis Perumahan (TTP) Kabupaten terdiri dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar, BAPPEDA Kabupaten Kampar dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

2. Tim Teknis Perumahan Kabupaten bertugas membantu dan melakukan evaluasi, memberi bantuan teknis, administrasi dan cara pengelolaan keuangan di tingkat kabupaten.
3. Tim Teknis Perumahan Kabupaten bertugas membantu dan melakukan evaluasi ditingkat kabupaten dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati.
4. Tim Teknis Perumahan Kabupaten memberikan dukungan atas kelancaran koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program ini di wilayah kerjanya.

#### C. Pelaksana Kegiatan Kabupaten (PK Kabupaten)

1. Pelaksanaan kegiatan Kabupaten berasal dari unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.
2. Pelaksanaan kegiatan Kabupaten melaksanakan tugas operasional sehari-hari dalam penyelenggaraan program pembangunan rumah layak huni yang meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program.<sup>9</sup>

Jadi untuk pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kampar dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan

---

<sup>9</sup> Buku Pedoman kegiatan rumah layak huni Kabupaten Kampar, Bab II.

pemerintahan daerah dan pelayanan umum berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.<sup>10</sup>

Secara fungsional, sebagian dasar kualitas perumahan dan pemukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai dengan skala yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan dan pemukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Secara fisik bangunan, masih banyak ditemui daerah-daerah di Kabupaten Kampar yang mana pemukiman penduduknya membangun rumah sebagai tempat tinggal yang tidak sesuai dengan standar bangunan yang sehat dan layak huni. Hal ini diakibatkan salah satunya adalah faktor ekonomi dan ketidak mampuan masyarakat itu sendiri. Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 11.289,28 Km persegi dengan jumlah penduduk hingga tahun 2012 sebanyak 787.495 jiwa (190.273 kk), serta 5.077 unit yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni dan belum memiliki tempat tinggal.<sup>11</sup>

Untuk itu dalam mendukung pilar pembangunan di Kabupaten Kampar, diperlukan kebijakan yang lebih terarah yang salah satunya antara lain melalui program pembangunan rumah layak huni. Program ini juga sebagai wujud pelaksanaan Program Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pembangunan rumah layak huni ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan sosial.

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

<sup>11</sup> Ibid.

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sudah membangun sebanyak 800 unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang tersebar pada masing-masing kecamatan. Pembangunan rumah ini dibiayai dari anggaran APBD Kabupaten Kampar, dimana setiap tahunnya jumlah rumah yang dibangun sebanyak 200 unit. Pada tahun 2011, Kecamatan XIII Koto Kampar mendapat bantuan pembangunan RSLH paling banyak, yaitu sebanyak 30 unit. Untuk tahun 2012, bantuan paling besar diberikan kepada Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu 35 unit rumah. Sedangkan pada tahun 2013, Kampar Kiri Hulu menerima bantuan RSLH paling besar, yaitu sebanyak 46 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1: Jumlah Rumah Sederhana Layak Huni Menurut Kecamatan dari Tahun 2011-2014

No	Kecamatan	TAHUN				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kampar Kiri	8	8	8	25	49
2	Kampar Kiri Hulu	20	35	46	15	116
3	Kampar Kiri Hilir	-	-	-	-	-
4	Kampar Kiri Tengah	-	-	-	8	8
5	Gunung Sahilan	-	-	-	4	4
6	XIII Koto Kampar	30	20	28	19	97
7	Koto Kampar Hulu	23	4	11	7	45
8	Kuok	5	8	14	4	31
9	Salo	-	-	4	6	10
10	Tapung	-	20	-	8	28
11	Tapung Hulu	9	-	4	6	19
12	Tapung Hilir	19	3	8	8	38
13	Bangkinang	10	10	11	15	46
14	Bangkinang Seberang	15	8	31	25	79
15	Kampar	-	8	11	18	37
16	Kampar Timur	-	5	4	3	12

1	2	3	4	5	6	7
17	Rumbio Jaya	27	24	-	8	59
18	Kampar Utara	10	16	8	10	44
19	Tambang	18	20	8	6	52
20	Siak Hulu	6	4	4	4	19
21	Perhentian Raja	-	7	-	1	8
<b>Total</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>800</b>

Sumber: Dinas Tata Kota dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama empat tahun pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan kecamatan paling banyak menerima bantuan, yaitu sebanyak 116 unit. Sementara itu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam program Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2011 - 2014 belum satupun mendapat bantuan RSLH. Kecamatan lain yang juga mendapat bantuan pembangunan RSLH cukup sedikit yaitu 4 unit RSLH yang sudah dibangun di kecamatan tersebut, itupun baru dibangun pada tahun 2014.

Tujuan pembangunan rumah layak huni Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 yaitu:

1. Melaksanakan 5 (lima) pilar Pembangunan Kabupaten Kampar dengan tujuan akhir mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan rumah-ruma kumuh.
2. Menyediakan rumah yang layak di huni bagi masyarakat miskin:
  - a. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan serta pemeliharaan;

- b. Memberi peluang kerja bagi masyarakat pedesaan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi;
- c. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan perumahan baik masyarakat maupun pemerintah yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kondisi di atas permasalahan bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Kampar adalah:

1. Berdasarkan observasi / data di lapangan, ditemukan adanya indikasi penerima bantuan rumah layak huni belum tepat sasaran. Adapun sumber penerima bantuan dinilai belum sesuai dengan kriteria penerima hibah rumah layak huni seperti yang tercantum pada buku pedoman kegiatan rumah layak huni.
2. Secara fungsional, sebagian dasar kualitas perumahan dan pemukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar yang memadai sesuai dengan skala yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan dan pemukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Sehubungan dengan latar belakang dan fenomena yang terjadi, untuk itu penulis sangat tertarik menelitinya dengan mengetengahkan judul tulisan ini, yaitu: **“Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, sehingga dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.

## **1.3. Batasan Masalah**

Dengan Luasnya pengertian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar maka penulis membatasi penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini adalah Kabupaten Kampar, dengan mengambil sampel penelitian di beberapa kecamatan yang menerima bantuan rumah layak huni, yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan dan Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiga kecamatan ini ditetapkan sebagai lingkup penelitian karena pada tiap kecamatan di Kabupaten Kampar yang berbeda ini memiliki permasalahan perumahan yang berbeda-beda, sehingga bentuk penanganannya juga berbeda satu dengan lainnya. Dengan dipilihnya tiga kecamatan ini diharapkan dapat mewakili evaluasi program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar.

Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar dari tahun 2011 – 2014, untuk membandingkan kenyataan dengan kondisi yang diharapkan melalui studi indikator beserta tolok ukurnya.

1. Dukungan Sumber Daya.
2. Mekanisme Pelaksanaan.

3. Sasaran, Waktu dan Mutu.
4. Keberlanjutan Manfaat.

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan;
2. Secara praktik, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni;

Secara akademik, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pemerintahan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah, Syafie<sup>1</sup> mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: Ada dua pihak yang terkandung kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintah, seperti yang dijelaskan syafi'ie<sup>2</sup> berarti ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan koordinasi dan kemampuan pemimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudiksi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha<sup>3</sup> pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Tama, Bandung, 2005, Hal. 20

<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 36

<sup>3</sup> Taliziduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal. 36

Budiardjo<sup>4</sup> (2003: 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy, belied*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Rasyid<sup>5</sup> (2002: 14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara kekerasan, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ndraha<sup>6</sup> (2003: 6) pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan.

---

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 21

<sup>5</sup> Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2002, Hal. 14

<sup>6</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hal. 6

Pada umumnya yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan memerintah.

Selanjutnya Ndraha<sup>7</sup> menyebutkan berbagai konsep (definisi) pemerintah:

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing (proses penyediaan) suatu jasa atau layanan melalui otoritas atau privatisasi.
2. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara seperti yang diatur dalam (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara yang oleh di konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia di bawah UUD 1945: Kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif.
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemeliharaan oleh lembaga perwakilan. Birokrasi dapat dianggap setara dengan tetapi lebih luas ketimbang pabrik atau perusahaan.
6. Pemerintah dalam arti pelayan, yaitu pemerintah dianggap sebagai warung (toko) dan pemerintah adalah pelayanan yang melayani pelanggan (pembeli).
7. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, yaitu berbeda dengan pemerintah pusat yang diwakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah, yaitu pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan azas dekonsentrasi dan desentralisasi contohnya Indonesia dibawah Undang-Undang.
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, yaitu konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (Binnenlands Bestuur, BB pamong praja).

---

<sup>7</sup> Ibid, Hal. 76

Pemerintah dalam konsep pemerintahan yaitu semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara empirik memproses jasa publik dan layanan sipil.

### **1.1.2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 dibidang ketatanegaraan, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya diatur atau ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang juga mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Beberapa Undang-Undang Pemerintahan daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, yang merupakan langkah pertama menerapkan demokrasi di daerah.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan penghapusan perbedaan antara cara pemerintahan di Jawa dan Madura (uniformitas).
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) ini hanya bersifat separatis, hal ini akibat berlakunya Kontitusi RIS dimana Negara Republik Indonesia berbentuk serikat.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sebagai usaha untuk menyeragamkan atau menyatukan UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah seluruh Indonesia.

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini terkenal dengan pemberian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mempersiapkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat, hal ini juga dilakukan pada tingkat Nasional yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ndraha menjelaskan masyarakat membutuhkan otonomi dalam rangka menyediakan kebutuhan dan kelanjutan hidupnya, mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya, sampai pada tingkat kualitas tertentu, sehingga daerah ini layak disebut daerah otonom<sup>8</sup>. Menurut Syafiie selama orde baru, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten, untuk mencegah pemberian otonomi seluas-luasnya maka Gubernur dirangkap oleh pejabat pemerintah pusat sehingga dikenal dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan Bupati, sesuai dengan kebutuhan dapat berbentuk Bupati Kepala Daerah tingkat II atau Walikota<sup>9</sup>.

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa<sup>10</sup>”.

---

<sup>8</sup> Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Banten: SiraoCredentia Center. Hal. 262.

<sup>9</sup> Syafiie Inu Kencana, 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 57

<sup>10</sup> Kansil dan Crhstine, 2008. *Pemerinyajan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 2.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberi hak otonomi yang seluas-luasnya membuat aturan sendiri kecuali urusan yang diatur sendiri oleh pemerintah pusat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 UUD tahun 1945 ayat (6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Seperti yang sudah disebutkan juga dalam pasal yang sama ayat 5 pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sementara itu pasal 18 ayat 2 menentukan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi dan melaksanakan urusan diluar urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum dapat dijelaskan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun asas tersebut adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

#### 1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Mengatur sebagian urusan dimaksud tidak semua urusan dapat dierahkan pemerintah kepada daerah, seperti penyerahan urusan

pertahanan dan keamanan akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintah secara separatist<sup>11</sup>. Lanjut Syafiie mengurus adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak ekektif sehingga pemerintah daerah dapat membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan, sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau dewan perwakilan rakyat daerah<sup>12</sup>.

## 2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi). Menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (8); Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Pengaturan dan penyelenggaraan asas dekonsentrasi serta yang berkaitan dengan pembentukan daerah administrasi atau wilayah pemerintah administrasi harus diperhatikan, antara lain<sup>13</sup>:

1. Kehadiran wilayah pemerintahan administrasi jangan sampai menggeser satuan pemerintahan otonom yang merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945.

---

<sup>11</sup> Syafiie Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 82.

<sup>12</sup> Syafiie Inu Kencana, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 178.

<sup>13</sup> Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, 2010. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia. Hal. 95.

2. Kehadiran wilayah pemerintahan administrasi jangan sampai menimbulkan dualisme penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah.
3. Kehadiran wilayah pemerintahan administrasi jangan sampai menimbulkan kesimpangsiuran wewenang, tugas dan tanggung jawab dengan satuan pemerintahan otonom yang akan mempengaruhi fungsi pelayanan terhadap masyarakat.

Penjelasan di atas dapat diimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem deksentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur atau instansi vertikal tanpa menggeser pemerintahan otonomi dan tidak menimbulkan dualisme dan kesimpangsiuran dalam penyelenggaraan pemerintahan otonom. Inti dari pelaksanaan dekonsentrasi adalah adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

### 3. Tugas Pembantuan

Kata lain dari tugas pembantuan adalah *Medebewind*. *Mede* dalam bahasa Belanda artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan *bewind* artinya berkuasa atau memerintah. Jadi pemerintah daerah ikut erta dalam mengurus suatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah<sup>14</sup>. Tugas pembantuan selalu berbarengan dengan asas otonomi. Perbedaan tugas pembantuan dengan rumah tangga senidri adalah urusannya bukan menjadi urusan rumah

---

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 83

tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pusat atau pemerintah tingkat lebih tinggi. Menurut UU 32 Tahun 2004 (kemudian diganti UU 23 Tahun 2014) menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

### 1.1.3. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Ni'matul Huda<sup>15</sup> menyatakan bahwa dibawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah. Tentang pemerintahan daerah hanya ada satu pasal yang berbunyi: pemerintah daerah diatur dalam undang-undang hanya saja dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga berifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, *kooti-kooti*, *sultanat-sultanat* tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

---

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal. 282.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Menurut Moh. Mahfud<sup>17</sup>, sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar tentulah merupakan konstitusi dari berbagai pemikiran politik ketika negara akan didirikan atau ketika konstitusi disusun, setelah itu Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan sangat penting karena harus menjadi landasan penyelenggaraan negara dari berbagai segi sehingga setiap tingkah laku atau kebijaksanaan politik dari setiap pimpinan negara senantiasa akan dilihat relevansinya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Dalam batang tubuh UUD 1945 diatur beberapa pokok yang implisit pembatasan kekuasaan dalam arti perlu adanya keseimbangan hak dan kewajiban.

Terdapat asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun asas-asas pemerintahan daerah adalah:

1. Asas Desentralisasi yaitu memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal. 40.

3. Asas Tugas Pembantuan artinya kewenangan pemerintah menjalankan pemerintahan daerah sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah, maka aspek hukum dalam pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.<sup>19</sup>

Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan “Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tuga pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>20</sup>

Dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyebutkan “dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pembentukan daerah pada dasarnya

---

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, Opcit, Hal. 307

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Opcit, pasal 20 ayat (1)

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 20 ayat (2)

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah yang diberikan otonomi daerah.<sup>21</sup>

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Pemerintahan daerah menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan

---

<sup>21</sup> UU No 12 Tahun 2008, Opcit, Pasal 20 ayat (3)

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana dalam pelaksanaannya dibentuk dan disusunlah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka setiap daerah baik itu daerah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya dan ketentuan perundangan.

Untuk itu dapat dilihat bahwa, kewenangan dari kepala daerah tersebut meliputi: perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

#### **1.1.4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat yang selanjutnya disebut dengan pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah daerah

adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik dalam lingkungan negara ataupun negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>22</sup>

Pemerintahan ini memiliki beberapa fungsi yakni *bestuur* (pemerintah), *regelin*, dan *vergunning* (perizinan). Dalam menjalankan fungsi ini diperlukan suatu wewenang bagi aparat pemerintah tersebut. Pengaturan wewenang ini sangat penting karena wewenang aparat pemerintah adalah hak istimewa yang dimilikinya (hak *Freis Emersson*). Perlunya pengaturan ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan amanah wewenang tersebut.

Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, diperlukan aspek legalitas yang diartikan sebagai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini memiliki dua aspek (aspek material dan aspek formal), aspek hukum material berkenaan atau berhubungan erat pada asas kepercayaan. Sedangkan aspek hukum formal membawa serta bahwa ketetapan-ketetapan yang memberatkan dan ketentuan-ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang

---

<sup>22</sup> Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 61

menguntungkan (antara lain izin-izin atau perizinan) haru disusun dengan kata-kata yang jelas.

Berdasarkan aspek-aspek legalitas tersebut setiap perbuatan atau tindakan aparatur pemerintah haruslah selalu berdasarkan pada aturan-aturan hukum. Misalnya dalam Keputusan Pemerintah yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Didalam perbuatan atau tindakan ini pemerintah sangatlah dibutuhkan kesadaran bahwa Peraturan Pemerintah yang dibuat adalah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang dimana aspek/asas legalitas ini ditegakkan. Artinya berdasarkan asas ini Undang-Undang tidak berlaku surut.

Jadi dalam rangka penerapan aspek/asas legalitas ini aparatur pemerintah berdasarkan hak yang dimilikinya, memiliki kekuasaan untuk leluasa dalam mengambil keputusan menurut batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah harus senantiasa mengacu pada beberapa asas, adapun asas-asas tersebut meliputi:

- a. Asas Otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi atas 2, yaitu:
  1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (UU No 32 Tahun 2004; pasal 1 angka 7). Pelaksanaan fungsi pemerintahan desentralisasi ini menunjukkan:
    - a. Satuan-satuan desentralisasi lebih *fleksibel* dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
    - b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
    - c. Satuan-satuan desentralisasi lebih *inovatif*.

- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan produktif.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh kepala pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 angka 8). Aspek dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:
  - a. Segi wewenang: memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.
  - b. Segi pembentuk pemerintah: membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
  - c. Segi pembagian wilayah: membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah administratif.
- b. Asas tugas pembantuan (*madebewind*) adalah penugasan dari pemerintah kepala daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>23</sup>

Salah satu asas pemerintahan tersebut yakni asas desentralisasi, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (7), desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah

---

<sup>23</sup> Kaho Jusuf Riwu, *Otonomi...*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 25

diberikan kewenangan untuk mengatur dan menguru rumah tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undanng-Undang No. 32 tahun 2004 ini, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3), yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama.<sup>25</sup>

Tujuan utama desentralisasi adalah:

1. Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional;
2. Tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

#### **2.1.5. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**

Sejak dianutnya negara hukum (*welfare state*) yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk memajukan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat di wilayah negara yang berangkutan, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 opcit pasal 1 ayat (7)

<sup>25</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Deentralisasi*, Pustaka Setia, Jakarta, 2010, Hal. 87

<sup>26</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 21

tetapi juga dalam bentuk ketentuan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

“Organ-organ pemerintah yang menerima wewenang dari masyarakat untuk dapat melakukan berbagai tindakan tertentu dalam menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis dari negara yang bersangkutan, disamping itu organ-organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak.”

Asas-asas umum pemerintahan yang layak ini dimaksudkan sebagai suatu sarana perlindungan hukum dan bahkan dijadikan juga sebagai salah satu instrumen untuk proses peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari berbagai tindakan pemerintah. Asas-asas umum pemerintahan yang layak ini dibagi dalam dua bagian, yaitu asas yang berifat formal atau *prosedural* dan asas yang bersifat material *substansial*.

Asas-asas umum pemerintahan yang layak merupakan suatu konsep yang terbuka dan lahir dari suatu proses sejarah, sehingga terdapat beberapa rumusan yang beragam mengenai asas-asas umum pemerintahan tersebut. Asas-asas umum pemerintahan yang layak yang dirumuskan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN adalah sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Jakarta, CV.Tamita Utama, 1999,):

---

<sup>27</sup> H.D Van Wijk/Willem Konijenenbelt dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006: 248

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

#### 2.1.6. Fungsi Pemerintahan

Menurut Ryaas Rasyid<sup>29</sup>, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, CV. Tamita Utama, Jakarta, Pasal 3 Angka 1-7.

<sup>29</sup> Ryaas Rasyid, Opcit, Hal. 49

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup dua fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni:

#### 1. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintahan yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua:

##### a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Kualitas pelayanan (*Service quality*) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan masyarakat.

##### b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari

fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

## 2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi *bargaining position*, tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi:

### a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

### b. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai *skill* dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan

terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

Secara umum fungsi pokok pemerintahan mencakup:

1. Pengaturan (*Regulation*) yakni melakukan perumusan dan implementasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) agar tercipta keteraturan dalam masyarakat.
2. Pembangunan (*Development*) yakni fungsi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera.
3. Pemberdayaan (*Empowerment*) yakni fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang mandiri.
4. Pelayanan (*Service*) yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta keadilan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

### 2.1.7. Konsep Manajemen Pemerintahan

#### a. Konsep Manajemen

Menurut *George R. Terry* Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>31</sup>

Selanjutnya *Indriyo Gitosudarmo* menyebutkan bahwa proses kegiatan dalam manajemen modern pada dasarnya mengikuti fungsi pokok yang dirumuskan POSDCRB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*).<sup>32</sup>

Berpijak pada sejumlah konsep manajemen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa,

---

<sup>30</sup> Azhari, Idham Ibtj dkk, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 80.

<sup>31</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 2

<sup>32</sup> Ibid, Hal 4

- (1) manajemen selalu diterapkan dalam hubungannya dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terhadap usaha satu orang tertentu,
- (2) dalam pengertian manajemen, selalu terkandung adanya suatu tujuan yang akan dicapai oleh sekelompok orang yang bersangkutan.

### **1. Prinsip-prinsip Manajemen**

Dalam manajemen melekat beberapa prinsip, antara lain:

- (1) pembagian kerja secara tuntas,
- (2) adanya wewenang dan standar yang jelas,
- (3) disiplin,
- (4) kesatuan perintah dan pengalaman,
- (5) tatanan yang baik,
- (6) kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi,
- (7) pemberian rangsangan kerja,
- (8) sentralisasi sebagai kekuasaan,
- (9) stabilitas anggotanya, jiwa kelompok yang tinggi harus dijaga,
- (10) manajer yang mempunyai keahlian tehnis, kemahiran kemanusiaan dan kemahiran melayani.

### **2. Unsur-unsur Dasar Manajemen**

Manajemen mempunyai unsur dasar yang meliputi

- (1) sumber daya manusia sebagai penggerak utama manajemen,
- (2) prasarana dan sarana untuk menunjang pencapaian tujuan,
- (3) alat untuk mencapai tujuan organisasi,
- (4) caracara yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi,

(5) sumber daya finansial yang dimiliki oleh organisasi untuk berproses mencapai tujuan.

### 3. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry, manajemen mengemban fungsi sebagai berikut:

#### a. Perencanaan/Planning

*Harold Koontz* dan *Cyril O. Donnell*, mendefinisikan perencanaan sebagai persiapan yang teratur dan setiap usaha yang mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Unsur-unsur perencanaan meliputi:

- (1) 'apa' yang akan dilakukan, sehingga perlu perencanaan
- (2) 'mengapa', yang akan menentukan alasan dan prionitas suatu pekenjaan,
- (3) 'siapa' (subyek) dan 'siapa' (obyek) yang menjadi pelaksana untuk mencapai tujuan,
- (4) 'dimana' tempat yang strategis untuk melaksanakan kegiatan,
- (5) 'kapan', suatu pelaksanaan dikerjakan,
- (6) 'bagaimana', yaitu cara, metode dan mekanisme pelaksanaan tersebut.

#### b. Pengorganisasian / Organizing

Pengorganisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang- orang, alat tugas, tanggung jawab atau wewenang, sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang dirumuskan.

Pengorganisasian mencakup tindakan: perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, menyusun perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi, departemenisasi, penetapan otoritas organisasi, *staffing dan facilitating*.

#### **c. Penggerak/Actuating**

Penggerak adalah bagaimana menyelenggarakan pekerjaan organisasi sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien.

#### **d. Pengarahan/ Directing**

Pengarahan merupakan aktivitas manajemen yang berupa pekerjaan pekerjaan memberi arah, menuntun bawahan dan menugaskan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditentukan dalam suatu usaha kerja sama.

Secara umum, pengarahan bergerak diatas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) keterpaduan antara tujuan perorangan dengan tujuan organisasi,
- (2) keterpaduan antara tujuan kelompok dengan tujuan organisasi,
- (3) kerjasama antar pimpinan,
- (4) partisipasi dalam pembuatan keputusan,
- (5) pelimpahan wewenang yang cukup memadai,
- (6) komunikasi yang efektif,
- (7) pengawasan yang efektif dan efisien.

#### **e. Koordinasi/ Coordinating**

Merupakan tugas pimpinan yang dilakukan dengan mengusahakan agar semua kegiatan dapat selaras dan anggota-anggotanya dapat bekerja sama dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan efisien.

#### **f. Pengambilan Keputusan/ Decision Making**

Proses pembatasan dan perumusan masalah, membuat alternatif pemecahan beserta konsekuensinya, memilih satu alternatif yang terbaik dan melaksanakan pilihan alternatif tersebut.

Proses ini melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- (1) identifikasi permasalahan,
- (2) analisis permasalahan,
- (3) membuat alternatif pemecahan masalah,
- (4) membandingkan masing-masing alternatif beserta konsekuensinya,
- (5) melaksanakannya.

#### **g. Pengendalian Pengawasan/ Controlling**

Suatu tindakan untuk mengawasi, mengantisipasi dan mendeteksi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan organisasi dan apa yang telah dirumuskan semula. Standar pengendalian meliputi:

- (1) standar fisik, yaitu berdasarkan ukuran non moneter dalam pelaksanaan, misalnya jam kerja yang harus dilaksanakan oleh karyawan,
- (2) standar moneter yang terdiri atas standar biaya, standar modal dan standar pendapatan,
- (3) standar abstrak, yaitu standar yang tidak diberikan dengan standar fisik, misalnya standar yang digunakan pimpinan untuk menetapkan kesetiaan bawahan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup><http://elisa.ugm.ac.id/community/show/organisasidanmanajemenpemerintahanoledhrasridjoharwinarliensu/#!/section/9437/1458450415>

## **b. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Dalam banyak pengertian, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian pengawasan dan pengendalian supaya apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik. Untuk merumuskan arti dari manajemen, maka kita dihadapkan kepada berbagai definisi dari manajemen tersebut. Dari keseluruhan pengertian tersebut, apabila kita mencoba untuk mencermatinya, maka terdapat semacam kesamaan-kesamaan pendapat yang bersifat umum mengenai arti manajemen.

Mengutip pendapatnya Suradinata<sup>34</sup>, manajemen diartikan sebagai “kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin”. Mengenai manajemen secara umum, yaitu:

1. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai
2. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain
3. Adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan
4. Adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu

Setelah mengetahui arti dari manajemen, maka kini kita akan mengkaitkannya antara manajemen dan pemerintahan. Untuk itu kita dapat mengikuti dua pendekatan dengan pendapat dari Siagian<sup>35</sup>, yang berpendapat bahwa keterkaitan antara manajemen dan pemerintah adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Suradinata Ermaya, 2002, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*, Bandung, Ramadhan, Hal:19.

<sup>35</sup> Sondang P Siagian, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hal:50.

“manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkatpusat maupun yang berada pada tingkat daerah”.

Suradinata<sup>36</sup>, memandang manajemen pemerintah sebagai “suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakkan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan”.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya tentang manajemen pemerintahan, Dede Mariana menjelaskan bahwa sebuah manajemen pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan cara:

1. Perencanaan meliputi pemilihan dan penentuan tujuan organisasi, kebijaksanaan program, dan lain-lain.
2. Pengorganisasian meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun organisasi atau kelompok kerja, penugasan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi.
3. Penyusunan personalia meliputi seleksi, latihan, pengembangan, penempatan, dan orientasi karyawan.
4. Pengarahan meliputi motivasi, komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan keryawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya.

---

<sup>36</sup> Suradinata, *Op.Cit*, Hal: 80

5. Pengawasan meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksana, dan pengambilan tindakan korektif.<sup>37</sup>

Suradinata<sup>38</sup> mengemukakan “pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintah yang berorientasi pada usaha bagi kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswasta. Manajemen pemerintah merupakan proses kegiatan pemerintah yang secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan pengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain:

- a. Fungsi perencanaan
- b. Fungsi pengorganisasian
- c. Fungsi penggerakkan
- d. Fungsi pengawasan dan pengendalian

Meskipun dalam perumusan fungsi-fungsi manajemen berbeda-beda, akan tetapi pada hakekatnya memiliki esensi yang sama. Masing-masing fungsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang hampir serupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan misalnya pengumpulan data, penentuan sasaran, penentuan metode, penentuan alat, kriteria keberhasilan termasuk dalam fungsi perencanaan.

---

<sup>37</sup> Nurman, *Op.Cit*, Hal 61 – 62

<sup>38</sup> Suradinata, *Op.Cit*, Hal:35

Kegiatan berupa pembagian tugas, pengelompokan tugas, penentuan susunan organisasi, kedudukan dalam organisasi apakah sebagai pimpinan, staf, merupakan kegiatan-kegiatan dalam fungsi pelaksanaan seperti pemberian perintah yang perlu dikerjakan penggerakkan bimbingan. Sedangkan fungsi pengawasan meliputi penilaian hasil dibandingkan dengan tujuan dan standar yang harus dicapai, penilaian ketataan, pengecekan, evaluasi.

#### **2.1.8. Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan monitoring dan pengumpulan informasi lain untuk menilai suatu program. Informasi-informasi tersebut juga digunakan untuk membuat perubahan dan peningkatan dalam pelaksanaan program.<sup>39</sup>

Menurut Zain Badudu, Evaluasi adalah menilai atau memaksa untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya cukup baik atau buruk.<sup>40</sup> Evaluasi bijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi adalah suatu tindakan atau usaha proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.<sup>41</sup>

Menurut Ndraha evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut

---

<sup>39</sup> [www.evaluationwiki.org](http://www.evaluationwiki.org), 2015

<sup>40</sup> Zain Badudu, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Sinar Harapan Jaya, Hal 402

<sup>41</sup> Sudjiono Anas, 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta, Raja Grafindo, Hal 1.

dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *Before – After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah.
2. Model *Das Solen – Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok kontrol – kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok kontrol.<sup>42</sup>

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*) dan pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Kemudian menurut Bryan & White<sup>43</sup>, evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Menurut PP Nomor 39 Tahun 2006<sup>44</sup>, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

---

<sup>42</sup> Ndraha Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta, Hal 202

<sup>43</sup> Bryan, Caroline dan Louis G, White, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta, LP3ES. Hal 21.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Menurut Edi Suharto<sup>45</sup>, evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya.
2. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai kelancaran perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan.
3. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Jadi, evaluasi kebijakan itu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan, sehingga dapat memberikan panduan kepada para pelaksana kebijakan, dan menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di waktu mendatang.

Edward A. Suchman dalam Nugroho<sup>46</sup>, mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab-penyebab lain;

<sup>45</sup> Suharto, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, Hal 40

<sup>46</sup> Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta. Gramedia, Hal 67.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*input indicators*): bahan-bahan dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan;
- b. Indikator proses (*Process Indicators*): cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumber daya diolah atau ditransformasikan menjadi penyediaan pelayanan;
- c. Indikator keluaran (*Output Indicators*): Barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program;
- d. Indikator dampak (*Outcome Indicators*): hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.<sup>47</sup>

### 2.1.9. Konsep Kebijakan

Duun mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan

---

<sup>47</sup> Suharto, Edi, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung, Hal. 40-41

kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan yang dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun inisiasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah ;

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan
- b. Penetapan diperoleh dari alternatif merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai badan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.<sup>48</sup>

Pengertian kebijakan publik adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan politik. Kebijakan publik merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik. Kebijakan Publik adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kebijakan publik mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah kebijakan

---

<sup>48</sup> Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University, Hal 22.

Publik bahwa “secara umum istilah kebijakan publik dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisasi*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, kebijakan publik berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.<sup>49</sup>

Sudarwan Danim mengemukakan kebijakan publik penilaian (*evaluating*) adalah “proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata-nyanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya.

Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut adalah:

- a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- b. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
- c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksana yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.<sup>50</sup>

Menurut Koryati mengemukakan secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, Hal 17.

<sup>50</sup> Sudarwan Danim, 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama*. Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 17.

<sup>51</sup> Koryati, Nyimas Dwi, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta. YPAPI, Hal. 7.

Lebih lanjut Koryati mengemukakan bahwa, kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan partaurnya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan benar-benar apa yang dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
- e. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undang dan bersifat memaksa (*otoritatip*).<sup>52</sup>

Menurut Jones kebijakan adalah keputusan tetap yang dicarikan oleh konsistensi dan penggulungan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan tersebut.<sup>53</sup>

Selanjutnya Jones mengatakan suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik, dari suatu kebijakan tersebut dapat mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. *Intentions*, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari seluruh tindakan
2. *Goals*, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai.
3. *Plans or proposal*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan/
4. *Program*, yaitu program yang disyahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. *Dicicions or Choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mepapai tujuan, mengembangkan rencana melaksanakan dan mengevaluasi program.
6. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Carles Jones, 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, Roja Grafindo Persada. Hal 47.

<sup>54</sup> Ibid, Hal 48 – 49.

Menurut Subarsono Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses sebagai berikut :

- a. Input adalah bahan baku (*raw materials*) yangdigunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dan dukungan masyarakat.
- b. Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakanm pelayanan/jasa, dan program.
- c. Outcome adalah suatu hasil suatu hasi kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat suatu kebijakan.
- d. Impacty (dampak) adalah akbiat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekwensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.<sup>55</sup>

Sementara itu menurut Kansil dan Cristine kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha atau aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.<sup>56</sup>

#### **2.1.10. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.<sup>57</sup> Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Namun demikian, dari evaluasi ini dihasilkan masukan – masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata – kata yang

---

<sup>55</sup> Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal 121.

<sup>56</sup> Cristine dan Kansil, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Askara, Hal. 190.

<sup>57</sup> Anderson, op.cit. Dalam Prof. Drs. Budiwinarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus* , Yogyakarta, Cetakan Kedua

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam artian yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah – masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi<sup>58</sup>.

Evaluasi kebijakan publik merupakan aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik akan melihat dan menilai kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah (daerah) apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum. Evaluasi kebijakan publik akan dapat menambah nilai dari proses kebijakan itu sendiri. Tanpa adanya evaluasi kebijakan, kinerja kebijakan tidak dapat diterangkan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel<sup>59</sup>.

Selanjutnya dikatakan Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan<sup>60</sup> :

- Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan – tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

---

<sup>58</sup> William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, Hal 608

<sup>59</sup> Adisasmita, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta, Graha Ilmu, Hal 115

<sup>60</sup> Ibid, Hal 609-610

- Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Menurut Edi Suharto<sup>61</sup>, Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut :

1. Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan – tujuannya.
2. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut di implementasikan.
3. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

Jadi evaluasi kebijakan itu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan, sehingga dapat memberikan panduan kepada para pelaksana kebijakan, dan menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan diwaktu mendatang.

Edward A. Suchman dalam Nugroho, mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan<sup>62</sup> :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab – penyebab lain.

---

<sup>61</sup>Op.Cit. Suharto, Hal 40

<sup>62</sup>Nugroho, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang. Jakarta, Gramedia, Hal 67

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kemudian dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan evaluasi, disebutkan langkah – langkah dalam mengevaluasi kebijakan publik<sup>63</sup>, yaitu :

- a. Mempelajari formulasi kebijakan
- b. Mempelajari metode dan langkah – langkah implementasikan kebijakan.
- c. Mempelajari kebijakan

Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut<sup>64</sup>:

- a. Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan – tujuannya.
- b. Member panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut di implementasikan.
- c. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

#### **2.1.11. Kemiskinan**

Kemiskinan sering diidentikkan dengan sedikitnya jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Soerjono mengartikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Op.Cit, Adisasmita, Hal 116

<sup>64</sup> Riant Nugroho, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta, PT. Alex Media, Hal 183

<sup>65</sup> Soekanto,S. 1990 *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafinso Persada. Jakarta

Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>66</sup>

Sedangkan definisi miskin menurut Departemen Sosial yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat banyak cara untuk dapat memberi hasil seperti yang diharapkan.<sup>67</sup>

Dalam bidang politik, usaha mengurangi kemiskinan pada umumnya dihormati sebagai gerakan sosial dan pemerintah mempunyai institusi atau departemen yang bertugas mengurangi kemiskinan. Salah satu perdebatan utama dalam bidang pengurangan kemiskinan adalah pertanyaan bagaimana mengaktifkan pemerintah untuk mengatur ekonomi dan menyediakan departemen untuk menaggulangi kemiskinan.<sup>68</sup>

Departemen sosial RI mendefinisikan pula dengan jelas bahwa kemiskinan itu adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai

---

<sup>66</sup> Departemen Pertanian, 1996

<sup>67</sup> Dalam Suharto, Edi. 2008. *Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan strategi*. www. Policy.hu/suharto.htm. Diakses tanggal 22 Oktober 2015.

<sup>68</sup> [www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org), diakses tanggal 22 Oktober 2015

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan orangnya dapat dikatakan fakir miskin, mereka adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.<sup>69</sup>

Dari beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu tidak jauh berbeda dari kondisi seseorang, kelompok maupun masyarakat yang masih belum dapat optimal memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya sehingga tingkat kualitas hidupnya dipandang rendah karena belum mendapatkan standar hidup yang layak.

Tinjauan dari konsep kemiskinan tersebut, mengundang pertanyaan yang lebih teknis seperti apa ukuran atau kriteria seseorang dikatakan sebagai orang miskin atau tidak miskin. Di Indonesia indikator nasional dalam menghitung jumlah penduduk yang hidup miskin ditentukan oleh standar Badan Pusat Statistik (BPS). Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin pada awalnya ditetapkan indikator kemiskinan sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Departemen Sosial RI. 2006. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Direktorat Pemberdayaan Sosial, Jakarta.

1. Memiliki penghasilan yang rendah atau berada dibawah garis kemiskinan yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah propinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketergantungan pada bantuan pangan
3. kemiskinan (zakat/raskin/santunan sosial).
4. Keterbatasan pemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki satu stel pakaian lengkap per orang per tahun).
5. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit.
6. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
7. Tidak memiliki harta yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis kemiskinan.
8. Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal.
9. Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.
10. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.<sup>70</sup>

Indikator tersebut sifatnya multidimensi, artinya setiap keluarga miskin dapat berbeda tingkat kedalaman kemiskinannya. Secara umum jika 3 kriteria

---

<sup>70</sup> Ibid

tersebut diatas terpenuhi, sudah dapat dikategorikan keluarga miskin yang layak memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dijelaskan pula untuk indikator rumah layak huni dengan kriteria sebagai berikut:

1. Luas bangunan sempit atau hanya mendukung fungsi ruang yang terbatas (memiliki bagian ruang yang tidak membedakan fungsi untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang makan dan ruang dapur) atau luas lantai perorang untuk keperluan sehari-hari kurang dari 4 m<sup>2</sup>.
2. Lantai masih dari tanah/bambu/diplester secara sederhana.
3. Kesulitan memperoleh air bersih.
4. Tidak memiliki tempat mandi, cuci pakaian dan membuang air besar (MCK) dirumah sendiri yang memenuhi syarat kesehatan.
5. Tidak mempunyai sirkulasi udara yang dapat memungkinkan sinar matahari dan udara masuk rumah dengan baik.
6. Dinding rumah terbuat dari bambu/papan/bahan yang mudah rusak.
7. Sanitasi lingkungan disekitar rumah yang tidak sehat.

Indikator rumah tidak layak huni tersebut sifatnya juga multidimensi, artinya setiap keluarga miskin dapat tinggal di rumah tidak layak huni yang berbeda-beda kondisinya. Secara umum jika 2 kriteria tersebut terpenuhi, sudah dapat dikategorikan rumah keluarga miskin tidak layak huni dan layak untuk memperoleh bantuan.

Seiring perkembangan pemikiran selanjutnya, Badan Pusat Statistik dalam Direktorat Fakir Miskin merevisi dan menetapkan 14 indikator kemiskinan atau rumah tangga miskin secara global, yaitu:

1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/ 2 (dua) kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000; per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, perak, kapal motor atau barang modal lainnya.<sup>71</sup>

Selanjutnya dijelaskan berdasarkan indikator kemiskinan tersebut, maka kemiskinan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hampir miskin, seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila memenuhi 6 – 9 indikator.
2. Miskin, seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila memenuhi 9 – 12 indikator.
3. Sangat miskin/fakir miskin, seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori sangat miskin atau fakir miskin apabila memenuhi 12 – 14 indikator.

Berdasarkan keterangan atas indikator di atas dapat dikatakan bahwa jika rumah tangga hanya memenuhi 5 (lima) atau dibawah 5 (lima) dari indikator tersebut maka dapat dikategorikan sebagai keluarga yang tidak miskin.

---

<sup>71</sup> Dalam Suradi dan Mujiadi. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Lima Provinsi*. Departemen Sosial RI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

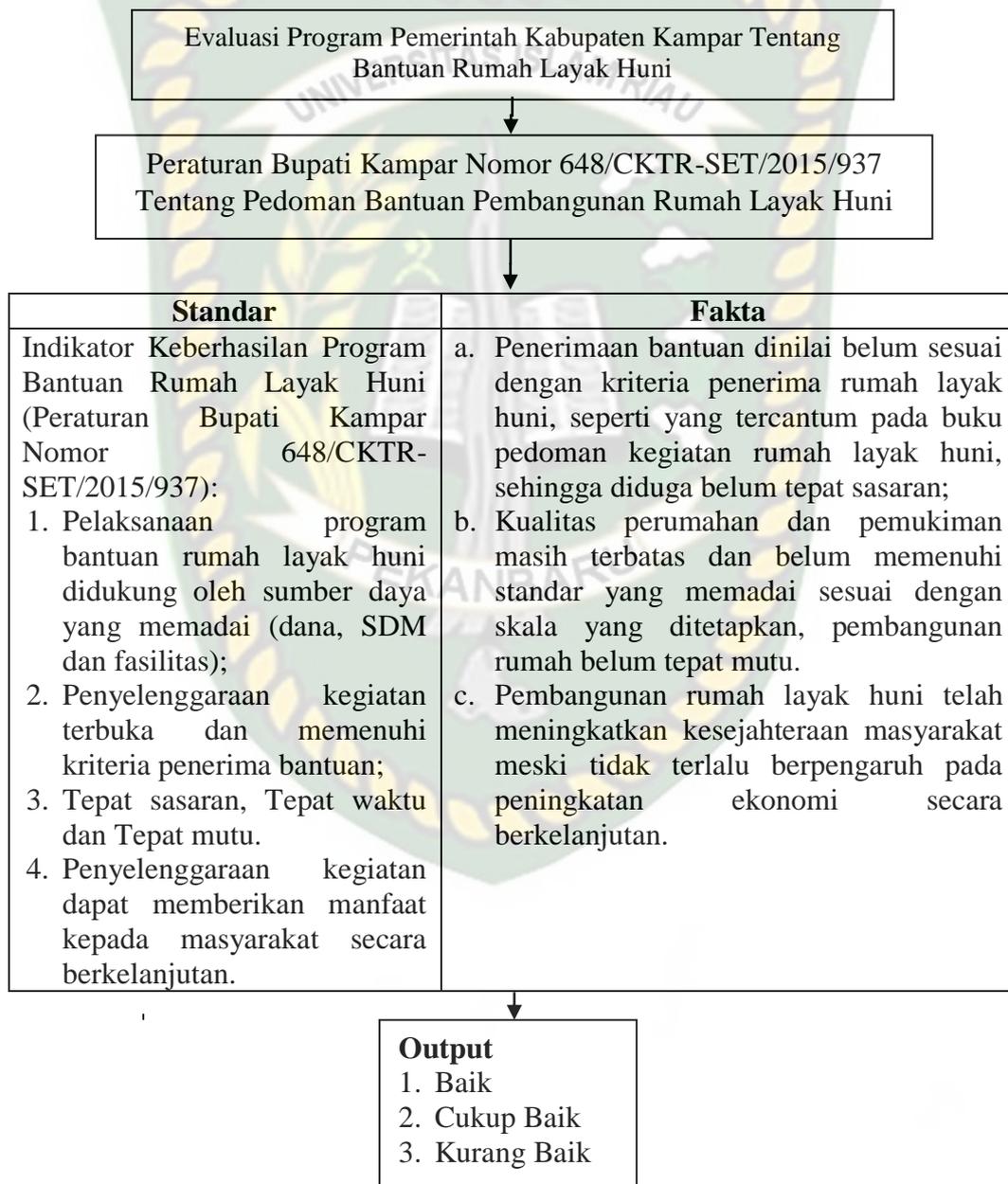
Tabel II.1: penelitian terdahulu tentang bantuan rumah layak huni.

No	Judul/Lokasi/tahun/peneliti	Metode dan Analisis data	Hasil
1	Evaluasi program rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari/ kota surabaya/ 2015/ Indah Prabawati.	Metode Kuantitatif dengan teknik skala likert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan lembaga diluar pemerintahan perlu dipertimbangkan lagi;</li> <li>2. Dalam hal efisiensi ketersediaan pekerja dirasa kurang;</li> <li>3. Bantuan dana sebesar Rp 5.000.000 dirasa masih belum cukup untuk memperbaiki rumah.</li> </ol>
2	Efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program bantuan rumah tidak layak huni oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi/ kabupaten padang lawas utara/ lisaini	Metode deskriptif: Teknik analisis data menggunakan tabel tunggal dan dijelaskan secara kuantitatif dengan skala likert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan sasaran, sasaran program bantuan rumah tidak layak huni adalah kurang efektif</li> <li>2. Program bantuan rumah tidak layak huni dilakukan dengan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan rencana yang ditentukan.</li> <li>3. Perubahan bentuk rumah masyarakat tidak banyak berubah.</li> </ol>
3	Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni/ kota surakarta/ 2010/ Ruli Khusnu Rizka	Metode Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sebesar 63% dari total pendataan rumah tidak layak huni pada tahun 2006.</li> <li>2. Tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program cukup tinggi, sebesar 95,89% tepat sasaran.</li> <li>3. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan program berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial tercapai sebesar 53,27%.</li> </ol>

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran ini dimaksudkan agar dapat dipahami secara seksama maka perlu untuk digambarkan kedalam sebuah diagram seperti dibawah:

**Gambar II.I: Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.**



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2016

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis mengemukakan rumusan jawaban atau kesimpulan sementara peneliti atas rumusan masalah. Oleh karena itu hipotesis peneliti dalam penelitian ini adalah: Keberhasilan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni diduga ditentukan dengan:

1. Dukungan sumber daya;
2. Mekanisme pelaksanaan;
3. Sasaran, Waktu dan Mutu; dan
4. Keberlanjutan manfaat.

## 1.5 Konsep Operasional

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut:

- a. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya yang dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni.
- b. Bantuan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
- c. Dukungan sumber daya adalah bahan-bahan dan sumber daya yang dipergunakan untuk pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar

tentang Bantuan Rumah Layak Huni, meliputi Dukungan dana yang dimiliki, Kemampuan sumber daya manusia/ aparaturnya dalam melaksanakan program dan Fasilitas yang memadai.

- d. Mekanisme pelaksanaan yaitu tata cara pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar meliputi Penentuan lokasi Desa/ Kelurahan, Kriteria penerima hibah Rumah Layak Huni, Pola Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, dan Penyaluran dana.
- e. Sasaran, waktu dan mutu adalah pelaksanaan program telah memenuhi indikator keberhasilan Program Bantuan Rumah Layak Huni yang dapat dilihat dari Sasaran penerima bantuan merupakan masyarakat miskin, Pelaksanaan pembangunan selesai dalam kurun waktu kurang dari 90 hari, dan Bangunan rumah layak huni sesuai standar teknik yang ditetapkan.
- f. Keberlanjutan manfaat adalah hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh program pemerintah Kabupaten Kampar tentang Bantuan Rumah Layak Huni secara berkelanjutan (sustainable), yang dinilai dari meningkatnya peran masyarakat dalam membangun rumah layak huni dan meningkatnya perekonomian masyarakat.

## **1.6 Operasional Variabel**

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang akan menjelaskan terhadap ukuran penelitian yaitu konsep evaluasi, variabel serta indikator yang dinilai akan mengarahkan dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item-Item Penilaian 4	Penilaian 5
Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan <i>planning, organizing, actuating</i> dan <i>controlling</i> , dimana masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula ( <i>George R. Terry</i> )	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Bantuan Rumah Layak Huni	Dukungan sumber daya	1. Dukungan dana yang dimiliki. 2. Kemampuan sumber daya manusia/ aparaturnya dalam melaksanakan program. 3. Fasilitas yang memadai.	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		Mekanisme pelaksanaan	1. Penentuan lokasi Desa/ Kelurahan penerima bantuan Rumah Layak Huni 2. Kriteria penerima bantuan Rumah Layak Huni 3. Pola Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. 4. Penyaluran dana.	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		Sasaran, waktu dan Mutu	1. Sasaran penerima bantuan merupakan masyarakat miskin; 2. Pelaksanaan pembangunan selesai dalam kurun waktu kurang dari 90 hari. 3. Bangunan rumah layak huni sesuai standar teknik yang ditetapkan.	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		Keberlanjutan manfaat	1. Meningkatkan peran masyarakat dalam membangun rumah layak huni. 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat.	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik

Sumber: modifikasi penulis 2016

## 2.7. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni ini diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu baik, cukup baik dan kurang baik. Untuk mengarahkan analisa data, uraian dari masing – masing pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

**Baik** : Jika rata - rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67% -100%.

**Cukup Baik** : Jika rata – rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

**Kurang Baik** : Jika rata – rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 0%-33%.

### 1. Dukungan sumber daya

**Baik** : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk menilai dukungan sumber daya dalam Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 67%-100%.

**Cukup Baik** : Apabila dua dari tiga item penilaian dapat dilaksanakan untuk menilai dukungan sumber daya Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun item penilaian dilaksanakan untuk menilai dukungan sumber daya Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 0%-33%.

## **2. Mekanisme Pelaksanaan**

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk menilai Mekanisme Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga item penilaian dapat dilaksanakan untuk menilai Mekanisme Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun item penilaian dilaksanakan untuk menilai Mekanisme Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 0%-33%.

## **3. Sasaran, Waktu dan Mutu**

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk menilai Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu dengan persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga item penilaian dapat dilaksanakan untuk menilai Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu dengan persentase 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun item penilaian dilaksanakan untuk menilai Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu dengan persentase 0%-33%.

#### **4. Keberlanjutan Manfaat**

Baik : Apabila semua item penilaian dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk menilai Keberlanjutan Manfaat Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila dua dari tiga item penilaian dapat dilaksanakan untuk menilai Keberlanjutan Manfaat Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun item penilaian dilaksanakan untuk menilai Keberlanjutan Manfaat Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dengan persentase 0%-33%.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Di dalam mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan secara survei dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian peneliti

an survei secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan questioner sebagai alat pengumpulan yang pokok, dan penelitian survei ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa questioner yang disebut diatas untuk disebarakan kepada sampel yang telah ditentukan.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kampar, berdasarkan data bahwa pelaksanaan program bantuan rumah layak huni tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar yang mendapatkan bantuan rumah layak huni paling sedikit. Oleh karena itu , peneliti mengambil Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni.

Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Adapun maksud penulis memilih Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang Kabupaten Kampar sebagai objek penelitian adalah mengingat dan menyadari bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar melaksanakan salah satu pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman bagi masyarakat miskin.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni dan masyarakat Kabupaten Kampar sebagai penerima bantuan rumah layak huni dan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah elemen Bappeda Kabupaten Kampar, Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar, dan Camat di kecamatan Kabupaten Kampar sebagai *Key Informant* untuk keakuratan data peneliti. Untuk lebih jelasnya pengambilan populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel III.1 : Populasi dan Sampel**

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Kampar	1	1	100%
2.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar	1	1	100%
3	Camat di Kabupaten Kampar	21	3	23,81%
4.	Kepala Desa di Kabupaten Kampar	250	6	10%
5.	Organisasi Masyarakat Setempat	~	10	-
6.	Tokoh Masyarakat	~	6	-
7.	Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar	217	90	-
<b>Jumlah</b>			<b>117</b>	<b>-</b>

Sumber: Olahan Data 2016

### **3.4. Teknik Penarikan Sampel**

Mengingat sebagian dari jumlah populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berbeda, maka pengambilan sampel menggunakan dua teknik, yaitu untuk sampel dari kalangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, diambil dengan teknik *purposive sampling* karena didasarkan pada kebutuhan penulis terhadap sampel yakni terhadap Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar, Camat yang ada di Kecamatan Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk pengambilan sampel dari masyarakat Kabupaten Kampar menggunakan teknik *random sampling*.

Dalam menentukan jumlah responden masyarakat penerima bantuan rumah layak huni, peneliti menggunakan tabel Krecjie dengan taraf signifikansi 10% (Lampiran 6). Adapun jumlah responden masyarakat penerima bantuan rumah layak huni dalam penelitian ini adalah 217 orang, untuk itu peneliti menetapkan jumlah populasi yang paling mendekati 217 pada tabel krecjie. Populasi yang mendekati yaitu 200 dengan ukuran sampel minimal 115 orang. Namun pada saat penelitian di lapangan dari 115 sampel yang ditetapkan, responden yang berhasil dijumpai sebanyak 90 orang.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban hasil wawancara peneliti dengan responden dan hasil observasi peneliti di lapangan bersama responden.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data penulis peroleh dari berbagai literatur, pendapat para ahli dan teori-teori tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar yang meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tersebut disahkan Peraturan Bupati Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 tentang pedoman bantuan pembangunan rumah layak huni.
- b. Rencana strategis dari berbagai instansi (Pemerintah Kabupaten Kampar), dan laporan instansi terkait dengan bantuan rumah layak huni;

- c. Kebijakan tentang bantuan rumah layak huni Kabupaten Kampar
  1. Visi dan misi Kabupaten Kampar
  2. Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kampar
  3. Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor
- e. Informasi mengenai program bantuan rumah layak huni Kabupaten Kampar (Jurnal, internet, buku-buku dan literatur).

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar secara tertulis yang diisi oleh responden terpilih berdasarkan alternative jawaban yang telah tersedia. Penyebaran kuesioner dilakukan tanggal 17 – 22 Juli 2016. Dari 115 kuesioner yang disebar kepada masyarakat penerima bantuan rumah layak huni, yang berhasil dihimpun peneliti sebanyak 90, sisanya 25 responden tidak dapat dijumpai dikarenakan sedang bekerja dan adanya kesulitan identifikasi lokasi rumah yang mendapatkan bantuan rumah layak huni disebabkan lokasinya yang tersebar (tidak mengelompok).
- b. Wawancara, yaitu berbentuk interaksi dan komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang

bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa diulang pada informan yang sama. Pada kenyataannya wawancara semacam ini telah mendorong terciptanya suatu hubungan baik antara peneliti dengan informan. Hubungan baik ini sangat membantu dalam upaya mendapatkan informasi dari informan, karena melalui itu dapat menghilangkan kecurigaan informan terhadap peneliti. Wawancara dilakukan tanggal 18 Juli 2016 – 25 Juli 2016.

- c. Observasi, dalam penelitian yang dilakukan ini, observasi yang penulis gunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Observasi yang dilakukan berupa catatan lapangan (Lampiran 3) dan foto-foto kondisi rumah-rumah bantuan layak huni (Lampiran 7). Observasi dilakukan dengan mengunjungi beberapa lokasi pelaksanaan program. Observasi dilakukan tanggal 11 Juli 2016 – 15 Juli 2016.
- d. Dokumentasi, yaitu data yang peneliti peroleh dari hasil arsip maupun dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari buku atau karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Sebagian Dokumentasi peneliti peroleh dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Kampar. Adapun dokumentasi yang berhasil peneliti kumpulkan dari lapangan yaitu:
  1. Foto dokumentasi pelaksanaan pembangunan rumah layak huni (Lampiran 7);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Lampiran 8);
  3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Lampiran 9);

4. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 600/CKTR-SET/2015/1598 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 (Lampiran 10);
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Rumah Layak Huni atas nama Rumah Ibu Nurmi, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 2015 (Lampiran 11);

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik kuantitatif. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variabel beserta indikatornya. Kemudian data dianalisa secara kuantitatif yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta dianalisis secara deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk tabel dan uraian.

### **3.8. Sistematika Penulisan**

**BAB I**      **Pendahuluan:** Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas, dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Oleh karena itu, bab ini akan meliputi uraian tentang mengapa peneliti tertarik meneliti tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar.

- BAB II Kajian Pustaka:** dalam bab ini dikemukakan dengan umum, ringkas, jelas, dan objektif tentang konsep teori, ulasan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.
- BAB III Metode Penelitian:** Dalam bab ini diuraikan tentang: tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, rancangan sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian:** Bab ini menggambarkan tentang Identitas Reponden, Hasil Penelitian dan Analisis Data.
- BAB V Penutup:** Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran penelitian.

### 3.9. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2: Rancangan waktu kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni.**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2016																							
		Feb				Mar				April				Mei				Agust				Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan dan pengajuan usulan penelitian	x	x	x	x	x	x																		
2	Seminar usulan penelitian							x																	
3	Perbaikan usulan penelitian								x	x															
4	Penyebaran angket											x													
5	Pengurusan rekomendasi penelitian											x													
6	Penelitian lapangan												x	x	x										
7	Pengolahan data															x	x								
8	Penyusunan laporan penelitian/tesis																	x	x						
9	Konsultasi tesis																			x	x	x			
10	Ujian tesis																								x
11	Revisi dan pengesahan tesis																							x	x

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2016

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **1.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar**

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2009 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undangundang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/ Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang;
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 Desa dan 4 Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci;
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.

#### **1.1.2. Keadaan Geografi**

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

1. Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm$  413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter.
2. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm$  90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Tabel IV.1. Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kampar Kiri	915,33	8,1
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11,5
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	6,7
4	Kampar Kiri Tengah	330,59	2,9
5	Gunung Sahilan	597,97	5,3
6	XIII Koto Kampar	732,40	6,5
7	Koto Kampar Hulu	674,00	6,0
8	Kuok	151,41	1,3
9	Salo	207,83	1,8
10	Tapung	1.365,97	12,1
11	Tapung Hulu	1.169,15	10,4
12	Tapung Hilir	1.013,56	9,0
13	Bangkinang	177,18	1,6
14	Bangkinang Seberang	253,50	2,2
15	Kampar	136,28	1,2
16	Kampar Timur	173,08	1,5
17	Rumbio Jaya	76,92	0,7
18	Kampar Utara	79,84	0,7
19	Tambang	371,94	3,3
20	Siak Hulu	689,80	6,1
21	Perhentian Raja	111,54	1,0
Jumlah Total		11.289,28	100

Sumber: Kampar Dalam Angka, 2015

Dilihat dari tabel IV.1 diatas, diketahui bahwa Kabupaten Kampar mempunyai luas wilayah yang cukup luas yaitu mencapai 11.289,28 km<sup>2</sup>. Hal ini tentu menjadi potensi bagi Kabupaten Kampar untuk meningkatkan pembangunan

daerah. Fokus penelitian ini yaitu pada Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dimana ketiga kecamatan ini memiliki persentase masing-masing sebesar 6% dari total luas wilayah Kabupaten Kampar, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu memiliki persentase luas wilayah yang paling besar yaitu 11,5%.

### **1.1.3. Pemerintahan**

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu

orang wakil bupati. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Dari 250 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2013 sebanyak 178 desa (71,2 persen) merupakan desa non tertinggal, 55 desa (22 persen) merupakan desa tertinggal, dan 17 desa (6,8 persen) merupakan desa sangat tertinggal. Desa sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 9 desa.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2015 sebanyak 10.307 orang. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan III paling banyak, yaitu 5.105 orang, disusul golongan IV sebanyak 3.382 orang, golongan II sebanyak 1.720 orang, sedangkan sisanya 100 orang adalah pegawai golongan I.

Tabel IV.2. Jumlah Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Non Tertinggal Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Non Tertinggal	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kampar Kiri	4	7	9	20
2	Kampar Kiri Hulu	9	7	8	24
3	Kampar Kiri Hilir	0	2	6	8
4	Kampar Kiri Tengah	0	2	9	11
5	Gunung Sahilan	0	2	7	9
6	XIII Koto Kampar	4	15	0	19
7	Koto Kampar Hulu	0	0	0	0
8	Kuok	0	1	8	9
9	Salo	0	2	4	6
10	Tapung	0	4	21	25
11	Tapung Hulu	0	0	14	14
12	Tapung Hilir	0	1	15	16
13	Bangkinang	0	0	4	4
14	Bangkinang Seberang	0	0	9	9
15	Kampar	0	0	18	18
16	Kampar Timur	0	0	9	9

1	2	3	4	5	6
17	Rumbio Jaya	0	0	7	7
18	Kampar Utara	0	2	6	8
19	Tambang	0	10	7	17
20	Siak Hulu	0	0	12	12
21	Perhentian Raja	0	0	5	5
Jumlah Total		17	55	178	250

Sumber: Kampar Dalam Angka, 2015

Melihat tabel IV.2 diatas, diketahui bahwa dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Kampar sangat disayangkan masih ada 17 desa tercatat sebagai desa sangat tertinggal, 55 desa tertinggal dan 178 desa non tertinggal. Dimana 4 diantara desa sangat tertinggal terdapat pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan XIII Koto Kampar.

Tabel IV.3. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga
1	2	3	4	5
1	Kampar Kiri	6.746	28.702	4
2	Kampar Kiri Hulu	2.862	11.552	4
3	Kampar Kiri Hilir	2.706	11.055	4
4	Kampar Kiri Tengah	6.438	25.850	4
5	Gunung Sahilan	4.688	18.787	4
6	XIII Koto Kampar	5.801	23.203	4
7	Koto Kampar Hulu	4.525	18.230	4
8	Kuok	5.385	24.248	5
9	Salo	5.653	24.957	4
10	Tapung	22.512	90.128	4
11	Tapung Hulu	18.799	76.128	4
12	Tapung Hilir	14.317	57.115	4
13	Bangkinang	8.418	37.796	4
14	Bangkinang Seberang	7.261	31.873	4
15	Kampar	10.688	48.813	5
16	Kampar Timur	5.472	23.344	4
17	Rumbio Jaya	3.881	16.630	4
18	Kampar Utara	3.538	16.609	5
19	Tambang	14.127	57.676	4

1	2	3	4	5
20	Siak Hulu	22.874	94.108	4
21	Perhentian Raja	4.237	16.880	4
Jumlah Total		180.928	753.681	4

Sumber: Kampar Dalam Angka, 2016

Dari tabel IV.3 diatas, terlihat bahwa Kabupaten Kampar memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari terdapat 180.928 Kepala Keluarga dengan 753.681 jiwa dengan rata-rata jiwa dalam rumah tangga 4 jiwa. Namun rata-rata 4 jiwa dalam satu rumah tangga masih dianggap wajar karena dianggap masih sesuai dengan program pemerintah dalam Keluarga Berencana.

Tabel IV.4. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1	Kampar Kiri	1.938
2	Kampar Kiri Hulu	1.370
3	Kampar Kiri Hilir	508
4	Kampar Kiri Tengah	745
5	Gunung Sahilan	1.385
6	XIII Koto Kampar	1.847
7	Koto Kampar Hulu	1.199
8	Kuok	1.156
9	Salo	1.249
10	Tapung	2.901
11	Tapung Hulu	2.585
12	Tapung Hilir	1.316
13	Bangkinang	700
14	Bangkinang Seberang	1.944
15	Kampar	2.286
16	Kampar Timur	936
17	Rumbio Jaya	766
18	Kampar Utara	772
19	Tambang	2.226
20	Siak Hulu	2.175
21	Perhentian Raja	550
Jumlah Total		30.554

Sumber: Kampar Dalam Angka, 2015

Melihat tabel IV.4. diatas, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kampar masih tinggi, diketahui untuk Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 11.552 (lihat tabel IV.3) terdapat 1.470 jumlah rumah tangga miskin, Kecamatan Gunung Sahilan dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 4.688 (lihat tabel IV.3) terdapat 1.385 jumlah rumah tangga miskin, dan Kecamatan XIII Koto Kampar dengan total jumlah rumah tangga sebanyak 5.801 (lihat tabel IV.3) terdapat 1.847 jumlah rumah tangga miskin. Hal ini tentu menjadi tugas berat pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Diharapkan dengan adanya program bantuan rumah layak huni ini, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar.

## **1.2. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang sebagai berikut:

### **1. Tugas:**

Secara umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

## 2. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Pemukiman, Bidang Cipta Karya melalui Seksi Perumahan dan Pemukiman. Adapun uraian tugas Seksi Perumahan dan Pemukiman adalah:

- a. Pelaksanaan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- b. Pelaksanaan penyediaan infrastruktur perumahan dan pemukiman;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur perumahan dan pemukiman;
- d. Penyelenggaraan pembinaan usaha pengembangan perumahan dan pemukiman;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta bantuan teknik pembangunan perumahan dan pemukiman;

- f. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perumahan dan pemukiman serta prasarana dan fasilitas lingkungan;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.<sup>1</sup>

Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Cipta Karya;
4. Bidang Tata Ruang;
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
6. Bidang Bina Program;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk mengetahui alur kerja antar bidang dapat dilihat pada Bagan Organisasi yang terlampir pada lampiran 1 Tesis ini.

Tabel IV.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Menurut Jenjang Pendidikan

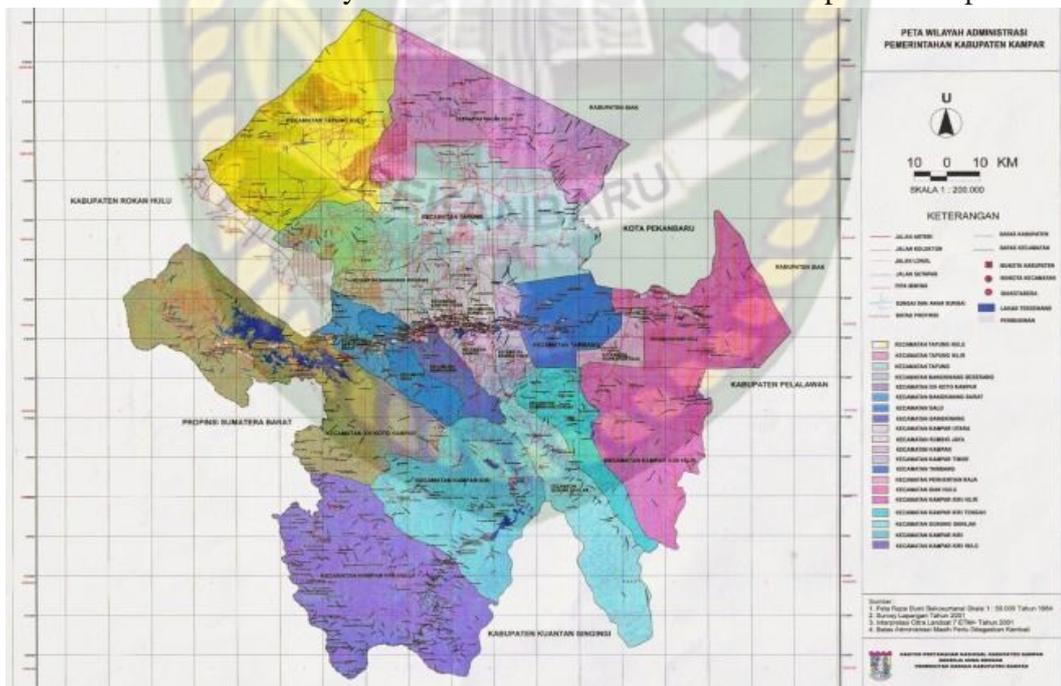
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	1
3	SMA	20
4	D1/D2	0
5	D3	10
6	S1/D4	30
7	S2	4
8	S3	0
Jumlah		65

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tahun 2015

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012, Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, Pasal 77 ayat (2).

Dari tabel IV.5 diatas, dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai selaku pelaksana kebijakan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar untuk tingkat pendidikan SLTP/Sederajat adalah berjumlah 1 orang, untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat adalah berjumlah 20 orang, untuk tingkat pendidikan D3 berjumlah 10 orang, tingkat pendidikan S1/D4 30 orang, dan tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 orang. Dari tabel diatas untuk tingkat pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 30 orang. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja pegawai.

Gambar IV.1 : Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar

Gambar IV.1 diatas menunjukkan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kampar yang terdiri dari 21 kecamatan.

### **1.3. Rekapitulasi Data Responden**

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Kampar yang berkaitan dengan evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang program bantuan rumah layak huni dimana dalam pembahasan ini penulis melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada sesuai dengan indikator variabel penelitian. Sebelum membahas mengenai indikator variabel penelitian evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang program bantuan rumah layak huni terlebih dahulu kita melihat identitas responden penelitian.

#### **4.3.1. Identitas Responden**

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh peneliti melalui kuisioner yang telah disebarakan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja, pangkat/golongan, dan usia responden. Dimana semua data ini berguna untuk perlengkapan dari penelitian yang penulis lakukan.

##### **1.3.1.1. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seorang pria bisa bekerja lebih cepat dari pada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi dalam menentukan hasil dari pekerjaan. Keduanya pun memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu diharapkan agar keduanya saling dapat mengisi dan melengkapi kekurangan sehingga tim kerja yang solid dapat tercapai. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, dimana

pria biasanya lebih cepat emosionalnya daripada wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 : Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelompok Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pemerintah	11	0	11
2	Masyarakat	91	15	106
Jumlah		102	15	117
Persentase		87%	13%	100%

Sumber : Data Olahan tahun 2016

Dari tabel IV.6 diatas diterangkan bahwa untuk distribusi jumlah responden penelitian pada Pemerintah Kabupaten Kampar menurut jenis kelamin yang terdiri dari laki – laki sebanyak 102 orang atau sama dengan 87% dan perempuan sebanyak 15 orang atau sama dengan 13%. Hendaknya dari jenis kelamin laki – laki dan perempuan tidak terjadi diskriminasi dan dapat disimpulkan bahwa pada penelitian tentang evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 102 orang atau sama dengan 87%.

### 1.3.1.2.Usia Responden

Usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berfikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya orang yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berfikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan didalam mengendalikan emosi menghadapi suatu

masalah dalam pekerjaannya. Namun demikian perlu diketahui bahwa semakin tua seseorang itu berarti kemampuan fisiknya akan berkurang daripada pegawai yang lebih muda. Jadi usia tua dan muda mempunyai masing – masing kelebihan dan kekurangan. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian pada Kantor Lurah Pelalawan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 : Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Umur

No	Usia	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Pegawai	Masyarakat		
1	21 – 30	0	5	5	4%
2	31 – 40	8	49	57	49%
3	41 – 50	3	36	39	33%
4	>50	0	16	16	14%
Jumlah		11	106	117	100%

Sumber : Data olahan tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian yang berada pada usia 21 – 30 tahun berjumlah 5 orang responden atau sama dengan 4%, responden yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 57 orang responden atau sekitar 49%, responden yang berusia 41 – 50 tahun berjumlah 39 orang responden atau sama dengan 33%, sedangkan responden yang berada pada usia 51 tahun keatas berjumlah 16 orang responden atau sama dengan 14%. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian tentang evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni didominasi oleh pegawai dan masyarakat yang berusia 31 – 40 tahun yaitu berjumlah 57 orang atau sama dengan 49%.

### 1.3.1.3. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha guna memberikan pengembangan terhadap pola pikir kita dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat dilihat tingkat pendidikan responden penelitian adalah berikut ini :

Tabel IV.8 : Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Pegawai	Masyarakat		
1	SD	0	26	26	22%
2	SLTP/ Sederajat	0	41	41	35%
3	SLTA/ Sederajat	1	29	30	26%
4	S1	9	9	18	15%
5	S2	1	1	2	2%
Jumlah		11	106	117	100%

Sumber : data olahan tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden penelitian tentang evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni untuk tingkat pendidikan SD adalah berjumlah 26 orang atau sama dengan 22%, untuk tingkat pendidikan SLTP/Sederajat adalah berjumlah 41 orang atau sama dengan 35%, untuk tingkat pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 31 orang atau sama dengan 26%, tingkat pendidikan S1 berjumlah 18 orang atau sama dengan 15%, dan tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang atau sama dengan 2%. Dari tabel diatas untuk tingkat pendidikan

didominasi oleh tingkat pendidikan SLTP/Sederajat yaitu sebanyak 41 orang atau sama dengan 35%.

#### 1.3.1.4.Masa Kerja Responden Pegawai

Masa kerja merupakan lamanya seseorang bekerja dalam suatu organisasi. Masa kerja juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku seorang pegawai dalam menjalankan suatu pekerjaan dimana yang memiliki masa kerja yang lama biasanya lebih memahami pekerjaan yang dialami serta dapat memberikan pengalamannya kepada pegawai yang baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.9 : Distribusi Jumlah Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja Pegawai

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	1 – 5 Tahun	4	36%
2	6 – 10 Tahun	2	18%
3	10 – 20 Tahun	5	46%
4	21 Tahun Keatas	0	0%
Jumlah		11	100%

Sumber : Hasil Olah Data Lapangan Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk responden yang mempunyai masa kerja 1 – 5 tahun sebanyak 4 orang responden atau sama dengan 36%, yang mempunyai masa kerja 6 – 10 tahun sebanyak 2 orang responden atau sama dengan 18%, untuk masa kerja 10 – 20 tahun sebanyak 5 orang responden atau sama dengan 46% dan yang mempunyai masa kerja 21 tahun keatas tidak satupun dari responden pegawai. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk pegawai yang mendominasi dalam masa kerja adalah selama 10 – 20 tahun, yaitu sebanyak 5 orang atau sama dengan 46%.

Diharapkan semakin lama seseorang bekerja maka semakin matang pula pola pikir seorang pegawai tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan juga sebagai abdi masyarakat.

### 1.3.2. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kampar

#### 1.3.2.1. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Karakteristik masyarakat penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan tingkat penghasilannya pada tiap kecamatan berdasarkan hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut.

Tabel IV.10 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan

No	Penghasilan	Jumlah	Persentase
1	< Rp500.000	8	9%
2	Rp500.000 – Rp 900.000	75	83%
3	Rp900.000 – Rp1.500.000	3	3%
4	>Rp1.500.000	4	5%
Jumlah		90	100%

Sumber: Hasil olah data lapangan tahun 2016

Tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan program rumah layak huni di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan dan Kecamatan XIII Koto Kampar didominasi oleh tingkat penghasilan warga sebesar Rp 500.000 - Rp900.000 dengan presentase sebesar 83% dan tingkat penghasilan warga sebesar Rp 300.000 – Rp 500.000 dengan presentase sebesar 9%. Sedangkan tingkat penghasilan masyarakat dominasi terkecil terdiri yaitu 5% masyarakat berpenghasilan lebih dari Rp1.500.000 dan 3% masyarakat dengan penghasilan sebesar Rp 900.000 – Rp 1.500.000.

### 1.3.2.2.Keadaan Rumah Sebelum Pelaksanaan Program

Program bantuan rumah layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni di Kabupaten Kampar. Keadaan rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan program bantuan rumah layak huni berdasarkan kriteria rumah tidak layak huni yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan criteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 tentang pedoman bantuan pembangunan rumah layak huni., dari hasil olah data kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel IV.11 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni

No	Kondisi Sebelum Program	Jumlah	Persentase
1	Belum memiliki rumah	16	18%
2	Sudah memiliki rumah, dengan kondisi:		
	a. Lantai dari tanah dan rumah pengap	70	78%
	b. Dinding/ Bangunan tidak permanen	71	79%
	c. Atap rumbia atau palstik	55	61%
	d. Tidak mempunyai akses MCK	51	57%
	e. Tidak memiliki sumber penerangan berupa listrik	44	49%
	f. Sumber air tidak sehat	69	77%
	g. Tidak mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan matahari	70	78%
	h. Kondisi rusak.	74	82%
	Jumlah	467	500%
	Rata-Rata	50	55,5%

Sumber: Hasil olah data lapangan tahun 2016

Keadaan rumah masyarakat penerima bantuan program rumah layak huni hasil olah data kuisisioner yang dibagikan kepada sampel masyarakat di Kecamatan

Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan dan Kecamatan XIII Koto Kampar. Adapun criteria rumah tidak layak huni yang banyak ditemukan adalah berupa rumah dalam keadaan rusak, luas lantai rata-rata per penghuni <4 m<sup>2</sup>, Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap, serta merupakan bangunan tidak permanen, dengan presentase rata-rata 55,5%.

### 1.3.2.3. Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program

Kesesuaian harapan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan pada tiap kecamatan berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner adalah sebagai berikut.

Tabel IV.12 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program

No	Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program	Jumlah	Persentase
1	Sesuai harapan	48	53%
2	Belum sesuai harapan	42	47%
Jumlah		90	100%

Sumber: Hasil olah data lapangan tahun 2016

Tingkat kesesuaian harapan masyarakat penerima bantuan program rumah layak huni di Kabupaten Kampar terbagi dalam dua suara, yaitu kelompok masyarakat yang merasa program telah sesuai dengan harapan mereka, yaitu sebesar 53% dan kelompok masyarakat yang merasa pelaksanaan program belum sesuai dengan keinginan mereka 47%.

#### 1.3.2.4. Dampak yang dirasakan masyarakat setelah pelaksanaan program

Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan pada tiap kecamatan berdasarkan hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut.

Tabel IV.13 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan dampak yang dirasakan Terhadap Pelaksanaan Program

No	Peningkatan Aspek	Ya		Tidak	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ketahanan rumah	90	100%	0	0%
2	Kejelasan status lahan dan rumah	90	100%	0	0%
3	Kecukupan luas area untuk tinggal	80	89%	10	11%
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat	30	33%	60	67%
5	Meningkatkan Keswadayaan masyarakat	71	79%	19	21%
6	Meningkatkan peran lembaga Keswadayaan Masyarakat	35	39%	55	61%

Sumber: Hasil sebaran kuesioner, Tahun 2016

Dari tabel IV.13 tersebut diketahui peningkatan yang dirasakan masyarakat atas pelaksanaan program bantuan rumah layak huni lebih dirasakan pada peningkatan fisik seperti ketahanan rumah, kejelasan status lahan dan rumah dan kecukupan area untuk tinggal. Karena secara umum program ini hanya membangun/ memperbaiki fisik rumah saja. Tetapi dengan adanya keterlibatan warga yang dikoordinatori oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dari masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan program ini, telah meningkatkan kebersamaan dan keswadayaan mereka. Sedangkan unuk ekonomi, karena hanya lokasi tertentu saja yang mendapatkan bantuan, maka peningkatan ekonomi hanya dirasakan sedikit kelompok masyarakat.

## 1.4. Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

### 1.4.1. Dukungan Sumber Daya

Berikut tanggapan responden pegawai mengenai indikator Dukungan Sumber Daya, penelitian tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut ini :

Tabel IV.14 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Dukungan Sumber Daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Dukungan dana yang dimiliki	0	9	2	11
2	Kemampuan sumber daya manusia/ aparatur dalam melaksanakan program.	0	3	8	11
3	Fasilitas yang memadai	0	9	2	11
Jumlah		0	21	12	33
Rata-Rata		0	7	4	11
Persentase		0%	64%	36%	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Cukup Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari hasil kuisioner responden pegawai diperoleh jawaban baik berjumlah 4 orang (36%), cukup baik 7 orang (64%), dan tidak satu pun yang menjawab kurang baik (0%), bahwa dalam menilai indikator Dukungan Sumber Daya dinilai dari tiga sub indikator yaitu dukungan dana yang dimiliki, kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program, dan fasilitas yang memadai diketahui bahwa jawaban responden tertinggi

sebanyak 64% berada pada kategori Cukup Baik. Adapun responden pegawai terdiri dari pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Camat Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan dan Kecamatan XIII Koto Kampar, beserta Kepala Desa di Kabupaten Kampar.

Artinya dari jawaban responden pegawai, mereka menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pembangunan rumah layak huni selain mengacu pada anggaran yang tersedia mereka juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni.

Tabel IV.15 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Dukungan Sumber Daya Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Dukungan dana yang dimiliki	8	74	24	106
2	Kemampuan sumber daya manusia/ aparatur dalam melaksanakan program.	15	69	22	106
3	Fasilitas yang memadai	8	74	24	106
Jumlah		31	217	70	318
Rata-Rata		10	72	23	106
Persentase		10%	<b>68%</b>	22%	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Cukup Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dapat dijelaskan dari tabel IV.15 jawaban masyarakat diperoleh dari organisasi masyarakat setempat sebanyak 10 orang, tokoh masyarakat yang mengetahui tentang program bantuan rumah layak huni 6 orang dan masyarakat penerima Bantuan Rumah Layak Huni 90 orang, total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 106 orang. Adapun jawaban responden masyarakat pada

indikator Dukungan Sumber Daya, diperoleh dari hasil kuisisioner yang telah disebarakan yang menjawab baik berjumlah 23 orang (22%), cukup baik 72 orang (68%), dan kurang baik berjumlah 10 orang (10%), yang berarti bahwa dari responden masyarakat selaku penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Kampar lebih banyak menjawab cukup baik dengan alasan bahwa jumlah dana yang diterima sudah mencukupi untuk membangun RLH dan petugas pelaksana program dinilai sudah menjalankan tugasnya, meskipun dalam pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 11 Juli 2016 dalam menilai indikator Dukungan Sumber Daya, disimpulkan bahwa bahan-bahan dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni yaitu:

1. Dana/ anggaran;

Ketersediaan biaya pelaksana program merupakan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan program bantuan RLH pada Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Jadi dengan tersediannya dana atau biaya untuk pelaksanaan program RLH ini diharapkan program dapat tersosialisasi dengan baik, program dapat berjalan dengan baik, program dapat selesai dengan yang di targetkan. Akan tetapi apa yang diharapkan belum begitu berjalan dengan baik, karena masih minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Perumahan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar mengatakan:

*“Sumber pendanaan bantuan rumah layak huni ini adalah berasal dari APBD. Sayapun meminta bersabar bagi Pihak Pemerintah Desa yang tidak kebagian jatahnya program ini karena untuk Program Bantuan Rumah Layak Huni pada anggaran Tahun ini (2015 dan 2016) sangat terbatas jumlahnya dan cenderung sedikit jumlahnya”<sup>2</sup>*

Wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Binamang di Kecamatan XIII Koto Kampar mengatakan:

*“Pembiayaan yang diterima sangat cukup, karena dengan dana seminimal tersebut tetap bisa melanjutkan pembangunan”<sup>3</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui Zero Rumah Kumuh merupakan salah satu dari tiga sasaran akhir pembangunan Kabupaten Kampar. Khusus untuk pencapaian zero rumah kumuh, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kampar selalu menganggarkan pembangunan RLH dan juga berupaya untuk memperjuangkan bantuan dari dana APBD Provinsi Riau dan dana dari APBN.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan yang sependapat yang memberi tanggapan tentang anggaran sebagai berikut:

*“Pembangunan banyak menggunakan material dari rumah kami sebelum pembangunan rumah ini karena anggaran yang minim.”<sup>4</sup>*

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 09.30 wib

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar, Tanggal 19 Juli 2016, Jam 09.00 wib

<sup>4</sup> (Wawancara dengan penerima bantuan Program Rumah Layak Huni salah satu desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Ibu Mail, 19 Juli 2016, jam 10.00)

*“Rumah ini dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah). Sementara tukang bangunan memang sudah disediakan pihak desa dengan gaji dipotong dari biaya yang ada tersebut”<sup>5</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa anggaran menjadi kendala dalam program ini. Dimana dengan dana sebesar Rp 60.000.000 masih sangat minim untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang.

2. Sumber daya manusia yang memadai;

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun kecil. Pada organisasi berskala besar, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan usaha, peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Perkembangan pemerintahan akan terealisasi apabila ditunjang oleh aparatur Negara yang berkualitas.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar:

*“Lantaran menjadi bagian dari program zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang musti bisa menjadi satuan kerja yang ready dan mampu menuntaskan pekerjaan dengan kualitas tinggi. Untuk mencapai misi semacam itu, tentu butuh aparatur yang punya skill dan kompetensi. “Kami terus berupaya menambah ilmu aparatur kami. Bisa lewat kursus dan menjalani pendidikan lagi. Sebab*

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sobri, masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Tanggal 20 Juli 2016, Jam 09.00 wib

*kami yakin, aparaturnya yang punya kompetensi bagus, hasil kerjanya juga akan bagus.”<sup>6</sup>*

Kemudian wawancara peneliti dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kampar mengatakan:

*“Tak hanya soal sumber daya manusia. Kehati-hatian juga sangat dibutuhkan. Soalnya, selama ini, kualitas pekerjaan sering menjadi persoalan. Bukan hanya lantaran keterbatasan SDM, tapi juga keteledoran. Itulah maknanya, biar yang semacam itu tadi tak terulang lagi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang perlu membuat aturan baru. Bahwa semua rencana kerja harus diekspose dulu. Biar tahu masalahnya apa. “Istilahnya, kita inventarisirlah masalah yang ada”.<sup>7</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui Ketersediaan tenaga pelaksana adalah tersedianya para pegawai dalam pelaksanaan program bantuan RLH pada Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Jadi dengan tersediannya jumlah pegawai yang mencukupi diharapkan pelaksanaan pekerjaan akan semakin cepat dan program-program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan semakin baik. Akan tetapi hal ini tidak seperti yang diharapkan, karena ketersediaan pegawai tenaga pelaksana di Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar.

### 3. Fasilitas yang memadai

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menjalankan kebijakan. Berikut ini penulis mendapatkan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 09.30 wib

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 14.00 wib

hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni ini fasilitas yang dibutuhkan adalah bahan material bangunan, alat-alat bangunan dan transportasi dan jalan tentunya”*.<sup>8</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua OMS salah satu desa di Kecamatan Tapung mengenai informasi dan kewenangan, sebagai berikut:

*“Informasi yang kami terima sudah jelas, lagipula kami sudah memegang buku pedoman pembangunan rumah layak huni”*<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informen diatas peneliti menganalisa bahwa penyampaian informasi bisa diterima dengan baik oleh OMS yang ada disetiap desa, hal itu dikarena dinas terkait sudah memberikan sosialisasi serta memberikan buku pedoman pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kampar sebelum program ini dilaksanakan.

#### 4. Pedoman teknis;

Pedoman teknis pengerjaan program bantuan RLH merupakan pedoman tentang teknis pengerjaan rumah bantuan RLH dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang wajib dijalankan oleh para penerima bantuan RLH Kabupaten Kampar. Jadi dengan adanya pedoman teknis pengerjaan RLH diupayakan semua pengerjaan rumah akan selesai seperti yang diharapkan, ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 09.40 wib

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Organisasi Masyarakat Setempat Kecamatan XIII Koto Kampar, Tanggal 19 Juli 2016, Jam 09.45 wib

Kampar walaupun masih ada sedikit kekurangan dalam penerapan pedoman teknis RLH.

#### 1.4.2. Mekanisme Pelaksanaan

Berikut tanggapan responden mengenai indikator Mekanisme Pelaksanaan kepada pegawai penelitian tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada tabel IV.16 berikut ini :

Tabel IV.16 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Penentuan lokasi Desa/ Kelurahan	0	4	7	11
2	Kriteria penerima bantuan rumah layak huni	0	2	9	11
3	Pola Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni	0	3	8	11
4	Penyaluran dana	0	6	5	11
Jumlah		0	15	29	44
Rata-Rata		0	4	7	11
Persentase		0%	34%	<b>66%</b>	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel IV.16 pada indikator Mekanisme Pelaksanaan, diperoleh jawaban responden pegawai dari hasil kuisisioner yang telah disebarkan yang menjawab baik rata-rata berjumlah 7 orang (66%), cukup baik 4 orang (34%), dan tidak ada satupun responden pegawai yang menjawab kurang baik (0%), sehingga jawaban responden pegawai selaku pelaksana pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kampar diklasifikasikan dalam kategori baik, dengan alasan bahwa kriteria penetapan penerima bantuan rumah layak huni dan pelaksanaannya telah

sesuai dengan prosedur dan teknis yang ada di Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Layak Huni.

Selanjutnya berikut tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Mekanisme Pelaksanaan penelitian tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada tabel IV.17 berikut ini:

Tabel IV.17 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Penentuan lokasi Desa/Kelurahan	0	56	50	106
2	Kriteria penerima bantuan rumah layak huni	7	53	46	106
3	Pola Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni	0	33	73	106
4	Proses penyaluran dana	0	55	51	106
Jumlah		7	197	220	424
Rata-Rata		2	49	55	106
Persentase		1,7%	46,5%	<b>51,9%</b>	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel IV.17 pada indikator Mekanisme Pelaksanaan, diperoleh jawaban responden masyarakat dari hasil kuisioner yang telah disebarakan yang menjawab baik rata-rata berjumlah 55 orang (51,9%), cukup baik 49 orang (46,5%%), dan 2 orang responden (1,7%) menjawab kurang baik, sehingga jawaban responden masyarakat selaku penerima bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar diklasifikasikan dalam kategori baik.

Adapun penilaian terhadap indikator Mekanisme Pelaksanaan dalam penelitian Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi desa/ kelurahan

Data penerima bantuan RLH dilakukan dengan cara rangking untuk dipilih siapa yang paling layak menerima bantuan. Hal ini dilakukan dengan melakukan musyawarah terhadap semua unsur masyarakat yang terdiri dari: RT, RW, Kepala Dusun dihadiri oleh Kepala Desa. Dari hasil musyawarah tersebut akan dipilih KK yang berhak menerima bantuan, kemudian dalam rapat tersebut langsung dibentuk OMS untuk pelaksanaan program tersebut. OMS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota yang dipilih dari unsur masyarakat tadi. OMS yang akan menjalankan proses pembangunan, tidak melibatkan campur tangan desa lagi. Setelah rumah selesai, OMS membuat laporan pertanggungjawaban kepada desa yang disampaikan langsung kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar untuk dilakukan pemeriksaan apakah rumah tersebut sudah layak atau belum.

Wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar:

*“Agar dapat pemerataan pembangunan di kecamatan, maka alokasi dana penerima bantuan RLH disamakan.”<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar, Tanggal 19 Juli 2016, Jam 013.00 wib

Wawancara peneliti dengan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Kampar Kiri Hulu mengatakan:

*“saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, paling tidak saya sudah punya tempat tinggal yang lebih baik daripada sebelumnya”<sup>11</sup>*

Wawancara peneliti dengan OMS (M.Guntur), terkait dengan kesesuaian data penerima bantuan rumah layak huni mengatakan:

*“Setiap kecamatan yang akan mendapat program yaitu beberapa desa/ kelurahan yang merupakan desa percontohan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kampar”<sup>12</sup>*

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, mengatakan:

*“Hasil akhir proses penentuan lokasi desa/ kelurahan ini merupakan sasaran per-kecamatan. Data yang dikumpulkan untuk melengkapi persyaratan menerima bantuan rumah layak huni diantaranya KTP, KK, Foto Rumah sebelum dibedah, surat tanah (boleh tidak asli tapi dilampirkan surat keterangan dari Kepala Desa setempat, jika data penerima yang dikumpulkn telah sesuai dan lengkap maka yang bersangkutan bisa mengikuti proses seleksi penerima bantuan rumah layak huni”<sup>13</sup>*

Setiap data penerima bantuan rumah layak huni ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar (Lampiran 8). Dari hasil wawancara dan observasi tersebut diketahui bahwa pembangunan dilakukan secara merata, hampir seluruh desa/kelurahan disetiap kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar mendapatkan bantuan RLH.

## 2. Kriteria penerima bantuan rumah layak huni

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sobri, masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Tanggal 20 Juli 2016, Jam 09.00 wib

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Organisasi Masyarakat Setempat Kecamatan XIII Koto Kampar, Tanggal 19 Juli 2016, Jam 10.00 wib

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 10.00 wib

Dalam penelitian evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni diketahui bahwa kesesuaian kriteria penerima bantuan rumah layak huni dilihat dengan dua tolok ukur yaitu:

- a. Sasaran adalah masyarakat miskin; dan
- b. Sasaran menempati rumah tidak layak huni.

Penilaian terhadap ketepatan sasaran tersebut dapat diketahui dari tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan dan kondisi rumah sebelum menerima progra bantuan rumah layak huni.

1. Tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan

Karakteristik masyarakat penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan tingkat penghasilannya pada tiap kecamatan berdasarkan hasil sebaran kuesioner peneliti didukung dengan observasi dan wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan penghasilan

No	Penghasilan	Jumlah	Persentase	Kesimpulan
1	< Rp500.000	8	9%	Tingkat penghasilan masyarakat yang didominasi oleh tingkat penghasilan Rp 500.000-900.000 sebesar 83% dan tingkat penghasilan masyarakat berpenghasilan > Rp 1.500.00 sebanyak 5%, menunjukkan bahwa kecilnya penyimpangan kelompok sasaran penerima bantuan.
2	Rp500.000 – Rp 900.000	75	83%	
3	Rp900.000 – Rp1.500.000	3	3%	
4	>Rp1.500.000	4	5%	
Jumlah		90	100%	

Sumber: Hasil observasi dan kuesioner tahun 2016

Berdasarkan pada Tabel IV.18 Tingkat Penghasilan Masyarakat Penerima Program di atas, tingkat penghasilan masyarakat penerima program bantuan

rumah layak huni di Kabupaten Kampar didominasi oleh tingkat penghasilan warga sebesar Rp 500.000 - 900.000 dengan presentase sebesar 83%. dan tingkat penghasilan masyarakat berpenghasilan > Rp 1.500.00 sebanyak 5%, Hal ini menunjukkan bahwa kecilnya penyimpangan kelompok sasaran penerima bantuan, dengan ketepatan sasaran sebesar 95%.

## 2. Kondisi rumah sebelum pelaksanaan program

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 12 Juli 2016 tentang indikator mekanisme pelaksanaan, dilakukan dengan penilaian kondisi rumah masyarakat sebelum menerima bantuan, untuk mengetahui kesesuaian kondisi rumah terhadap kriteria rumah tidak layak huni dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.19 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi Rumah Sebelum Mendapatkan Bantuan Rumah Layak Huni

No	Kondisi Sebelum Program	Jumlah	%	Kesimpulan
1	Belum memiliki rumah	16	18%	
2	Sudah memiliki rumah, dengan kondisi:			Keadaan rumah sebelum pelaksanaan program didominasi oleh rumah rumah dalam keadaan rusak, Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap, bangunan tidak permanen, serta tidak mempunyai akses MCK, dengan presentase rata-rata 55,5%.
	a. Lantai dari tanah dan rumah pengap	70	78%	
	b. Dinding/ Bangunan tidak permanen	71	79%	
	c. Atap rumbia atau palstik	55	61%	
	d. Tidak mempunyai akses MCK	51	57%	
	e. Tidak memiliki sumber penerangan berupa listrik	44	49%	
	f. Sumber air tidak sehat	69	77%	
	g. Tidak mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan matahari	70	78%	
	h. Kondisi rusak.	74	82%	
	Jumlah	467	500%	
	Rata-Rata	50	55,5%	

Sumber: Hasil Observasi dan Kuesioner Tahun 2016

Dari Tabel IV.19 diketahui Kondisi Rumah Sebelum Pelaksanaan Program didominasi oleh rumah-rumah dalam keadaan rusak, Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap, bangunan tidak permanen, serta tidak mempunyai akses MCK, dengan presentase rata-rata 55,5%. Maka bisa dianggap bahwa rumah-rumah penerima program perbaikan rumah tidak layak huni ini telah memenuhi persyaratan rumah tidak layak huni.

### 3. Pola Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni

Adanya pengawasan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana program bantuan RLH untuk mengetahui bahwa pelaksanaan atau hasil program telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui atau dapat ditanggulangi. Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan kelemahan-kelemahan tersebut. Pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terkait program bantuan RLH mengatakan:

*“Rumah Layak Huni itu dikerjakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan OMS bertanggung jawab kepada Dinas Cipta Karya melalui Kepala Desa yang menerima bantuan Rumah Layak Huni tersebut. Rumah yang telah selesai dibangun lalu diperiksa oleh inspektorat dan BPK sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan program Bantuan Rumah Layak Huni”.*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 09.40 wib

Kemudian wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar mengatakan:

*“standar rumah layak huni yang dibangun adalah tipe 36 dan memiliki 2 kamar. Pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni baru bisa dikerjakan setelah Surat Keputusan (SK) Bupati terbit dan dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar bertanggung jawab kepada Bupati”*.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa proses pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni.

#### 4. Proses Penyaluran Dana

Proses dan Mekanisme pengajuan serta pencarian bantuan program rumah layak huni sebesar Rp 60.000.000; (enam puluh juta rupiah) tiap rumah/KK telah diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni. Untuk pelaksanaan mekanisme pengajuan bantuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan mekanisme pencairan bantuan secara administratif diserahkan kepada ketua dan bendahara kelompok kerja penerima bantuan pembangunan rumah tidak layak huni mewakili anggota kelompok penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni oleh Kantor Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penyerahan Bantuan.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar, Tanggal 18 Juli 2016, Jam 11.00 wib

Untuk mengetahui sumber dan besar bantuan, pelaksanaan mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan serta penggunaan bantuan pada tiap kelurahan studi kasus, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.20: Pembiayaan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni Kabupaten Kampar

Aspek	Kecamatan		
	XIII Koto Kampar	Gunung Sahilan	Kampar Kiri Hulu
Sumber Bantuan	APBD	APBD	APBD
Mekanisme Pengajuan Bantuan	Melalui proposal yang dibuat oleh Desa dikirim ke Dinas CK dengan melengkapi syarat sesuai pedum. Dalam proses pengajuan tidak melibatkan camat, camat hanya mengetahui.	Melalui proposal yang dibuat oleh Desa dikirim ke Dinas CK dengan melengkapi syarat sesuai pedum. Dalam proses pengajuan tidak melibatkan camat, camat hanya mengetahui.	Melalui proposal yang dibuat oleh Desa dikirim ke Dinas CK dengan melengkapi syarat sesuai pedum. Dalam proses pengajuan tidak melibatkan camat, camat hanya mengetahui.
Mekanisme Pencairan Bantuan	Pencairan dilakukan 2 kali, yaitu 50% diawal dan 50% diakhir. Total pencairan sebesar 60 juta.	Pencairan dilakukan 2 kali, yaitu 50% diawal dan 50% diakhir. Total pencairan sebesar 60 juta.	Pencairan dilakukan 2 kali, yaitu 50% diawal dan 50% diakhir. Total pencairan sebesar 60 juta.
Penggunaan Bantuan	Dana yang telah dicairkan dikelola oleh OMS yang telah ditunjuk untuk dilakukan pembangunan rumah layak huni	Dana yang telah dicairkan dikelola oleh OMS yang telah ditunjuk untuk dilakukan pembangunan rumah layak huni	Dana yang telah dicairkan dikelola oleh OMS yang telah ditunjuk untuk dilakukan pembangunan rumah layak huni
Pembiayaan Lain	-	-	-

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Dari tabel IV.20 diketahui dari tiga kecamatan di Kabupaten Kampar, memiliki pola pelaksanaan program yang sama. Besarnya bantuan rumah layak huni yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar adalah sebesar Rp60.000.000 tiap rumah/KK, dengan tiga kali tahap pencairan yaitu 40% tahap

pertama dengan melampirkan kontrak kerja, 40% tahap kedua setelah progres fisik pekerjaan 50%, dan 20% tahap akhir setelah progres fisik pekerjaan 100%. Tapi dalam pelaksanaannya, proses pencairan dilakukan dengan dua tahap yaitu 40% diawal dan 60% diakhir. Disini peneliti melihat lemahnya proses pengawasan dalam pelaksanaan program baik dalam proses penyaluran dana maupun dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Mekanisme pengawasan juga tidak dijelaskan secara spesifik didalam Peraturan Bupati Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 dimana Peraturan Bupati inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program.

#### 1.4.3. Sasaran, Waktu dan Mutu

Berikut tanggapan responden mengenai indikator Sasaran, Waktu dan Mutu kepada pegawai penelitian tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini:

Tabel IV.21 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Sasaran penerima bantuan merupakan masyarakat miskin	0	4	7	11
2	Pelaksanaan pembangunan selesai dalam kurun waktu kurang dari 90 hari	0	7	4	11
3	Bangunan Rumah Layak Huni sesuai dengan standar teknik yang ditentukan	0	6	5	11
Jumlah		0	17	16	33
Rata-Rata		0	6	5	11
Persentase		0%	<b>52%</b>	48%	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Cukup Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel IV.21 pada indikator Sasaran, Waktu dan Mutu, diperoleh jawaban responden pegawai dari hasil kuisisioner yang telah disebarkan yang menjawab baik rata-rata berjumlah 5 orang (48%), cukup baik 6 orang (52%), dan tidak ada satupun responden pegawai yang menjawab kurang baik (0%), sehingga jawaban responden pegawai selaku pelaksana pembangunan RLH di Kabupaten Kampar diklasifikasikan dalam kategori cukup baik, dengan alasan bahwa pelaksanaan program bantuan rumah layak huni telah tepat sasaran, tepat waktu dan bermutu.

Selanjutnya berikut tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Sasaran, Waktu dan Mutu penelitian tentang Evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel IV.22 berikut ini:

Tabel IV.22 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Sasaran, Waktu dan Mutu Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Sasaran penerima bantuan merupakan masyarakat miskin	1	58	47	106
2	Pelaksanaan pembangunan selesai dalam kurun waktu kurang dari 90 hari	3	76	27	106
3	Bangunan Rumah Layak Huni sesuai dengan standar teknik yang ditentukan	3	63	40	106
Jumlah		7	197	114	318
Rata-Rata		2	66	38	106
Persentase		2%	<b>62%</b>	36%	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Cukup Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel IV.22 pada indikator Sasaran, Waktu dan Mutu, diperoleh jawaban responden masyarakat dari hasil kuisisioner yang telah disebarkan yang

menjawab baik rata-rata berjumlah 38 orang (36%), cukup baik 66 orang (62%), dan 2 orang responden (2%) menjawab kurang baik, sehingga jawaban responden masyarakat selaku penerima bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar diklasifikasikan dalam kategori cukup baik dengan alasan meskipun pelaksanaan program bantuan rumah layak huni telah tepat sasaran namun tidak menjamin mutu terhadap rumah yang telah dibangun.

Berikut hasil wawancara dan observasi peneliti mengenai indikator Sasaran, Waktu dan Mutu dalam penelitian evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni:

a. Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti diketahui bahwa tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini cukup tinggi dimana rumah-rumah yang mendapatkan bantuan telah memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dengan rata-rata capaian 55,5% (Tabel IV.19), dan dilihat dari tingkat penghasilan masyarakat, memenuhi kriteria miskin dengan ketepatan sebesar 95% (Tabel IV.18). Bantuan rumah layak huni telah tepat sasaran, karena penerima bantuan murni adalah masyarakat miskin dan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.

b. Tepat Waktu

Jangka waktu pelaksanaan program adalah lamanya waktu yang dibutuhkan seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program bantuan RLH. Sebab dengan penggunaan waktu yang tepat, diharapkan program itu dapat terlaksana secara maksimal dan merata di seluruh kawasan Kabupaten Kampar. Akan tetapi hal ini belum dapat terlaksana tepat waktu seperti yang ditetapkan, ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti lamanya tahapan pencairan anggaran hingga lamanya proses pengajuan proposal yang diberikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar dalam menjalankan program ini.

Ketepatan waktu pengerjaan adalah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar selaku penyelenggara program. Sebab dengan penyelesaian pekerjaan yang selesai tepat waktu, maka diharapkan program ini dapat terlaksana sesuai tujuan program. Akan tetapi hal ini belum dapat terlaksana dikarenakan ada beberapa kendala yang mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Salah satu kendalanya yaitu jarak tempuh tempat pembangunan, dan ketersediaan bahan dalam pembangunan rumah layak huni.

c. Bermutu

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 13 Juli 2016 diketahui bahwa rumah yang dibangun adalah tipe rumah 36 dan dinilai standar, finishing kurang rapi dan perlu perbaikan, kondisi pemasangan asal-asalan dan pengaplikasian cat kurang rapi (Lampiran 7: Gambar 7).

#### 1.4.4. Keberlanjutan Manfaat

Berikut tanggapan responden mengenai indikator Keberlanjutan Manfaat kepada pegawai penelitian tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni dapat dilihat pada tabel IV.23 berikut ini :

Tabel IV.23 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Pegawai) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam membangun rumah layak huni	0	3	8	11
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	0	4	7	11
Jumlah		0	7	15	22
Rata-Rata		0	4	8	11
Persentase		0%	32%	68%	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel IV.23 pada indikator keberlanjutan manfaat, diperoleh jawaban responden pegawai dari hasil kuisioner yang telah disebarkan yang menjawab baik rata-rata berjumlah 8 orang (68%), cukup baik 4 orang (32%), dan tidak ada satupun responden pegawai yang menjawab kurang baik (0%), sehingga jawaban responden pegawai selaku pelaksana pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Kampar diklasifikasikan dalam kategori baik.

Selanjutnya berikut tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Keberlanjutan Manfaat penelitian tentang Evaluasi program pemerintah

Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel IV.24 berikut ini:

Tabel IV.24 : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden (Masyarakat) Terhadap Indikator Keberlanjutan Manfaat Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		KB	CB	B	
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam membangun rumah layak huni	2	57	47	106
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	0	37	69	106
Jumlah		2	94	116	212
Rata-Rata		1	47	58	106
Persentase		1%	44%	55%	100%
Klasifikasi Pengukuran		<b>Baik</b>			

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2016

Dari tabel IV.24 pada indikator Keberlanjutan Manfaat, diperoleh jawaban responden masyarakat dari hasil kuisisioner yang telah disebarkan yang menjawab baik rata-rata berjumlah 58 orang (55%), cukup baik 47 orang (44%), dan 1 orang responden (1%) menjawab kurang baik, sehingga jawaban responden masyarakat selaku penerima bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar diklasifikasikan dalam kategori baik dengan alasan pembangunan rumah layak huni dinilai sudah sesuai dengan harapan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam menilai indikator keberlanjutan manfaat adalah sebagai berikut:

a. Kelayakan Program

Kesesuaian harapan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan pada tiap kecamatan berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.25 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden Penelitian Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Berdasarkan Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program

No	Kesesuaian Harapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program	Jumlah	Persentase	Kesimpulan
1	Sesuai harapan	48	53%	Presentase persepsi masyarakat yg merasa harapan mereka telah sesuai lebih tinggi dari masyarakat yang merasa harapan belum sesuai dengan pelaksanaan program.
2	Belum sesuai harapan	42	47%	
Jumlah		90	100%	

Sumber: Hasil olah data lapangan tahun 2016

Tingkat kesesuaian harapan masyarakat penerima bantuan program RLH di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan, dan XIII Koto Kampar terbagi dalam dua suara, yaitu kelompok masyarakat yang merasa program telah sesuai dengan harapan mereka, yaitu sebesar 53% dan kelompok masyarakat yang merasa pelaksanaan program belum sesuai dengan keinginan mereka 47%. Kesesuaian harapan masyarakat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat sebagai objek penerima bantuan dalam program bantuan RLH, secara langsung merasakan dampak pelaksanaan program. Persepsi masyarakat diperlukan dalam evaluasi program untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dimata masyarakat.

Peningkatan kualitas program adalah dengan dilaksanakannya program bantuan RLH pada seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten

Kampar, maka diharapkan adanya peningkatan kualitas program, guna membantu pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan untuk Kabupaten Kampar baik itu dalam hal pelayanan administrasi, peningkatan jumlah penerima bantuan, kualitas material dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk program bantuan RLH.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Kampar Kiri Hulu:

*“Saya sangat bersyukur mendapat bantuan ini, karena tidak semua masyarakat yang mendapatkannya. Disini yang kurang mampu bukan hanya saya tapi masih banyak. Namun sangat disayangkan sebenarnya pembangunan ini terkesan buru-buru sehingga pengerjaan tukang bangunan seperti asal-asalan, dinding nya saja sudah retak-retak padahal baru 2 tahun dibangun”*.<sup>16</sup>

Kelayakan Program yaitu dengan dilaksanakannya program bantuan RLH oleh Seksi Perumahan dan Pemukiman, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar diharapkan program ini dirasa tepat untuk menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan untuk Kabupaten Kampar. Dalam hal ini terlihat bahwa program RLH memang dirasa tepat dijadikan salah satu program pengentasan kemiskinan.

#### b. Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan yaitu dengan dilaksanakannya program bantuan RLH oleh Seksi Perumahan dan Pemukiman Dinas Cipta Karya dan Tata

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, tanggal 19 Juli 2016, jam 14:00

Ruang Kabupaten Kampar diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kampar terutama dibidang perumahan. Dalam hal ini sudah ada sedikit penurunan angka kemiskinan di bidang perumahan tidak layak huni.

Berdasarkan hasil observasi dan jawaban kuisisioner maka secara tidak langsung program bantuan RLH telah meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat meski tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk mengetahui data Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel jawaban dari responden pegawai dan masyarakat yang telah di akumulasi dari semua jawaban responden (rata – rata) berdasarkan indikator dan sub – indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.26 : Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Didukung Sumber Daya	4	7	0	11
2	Mekanisme Pelaksanaan	7	4	0	11
3	Sasaran, Waktu dan Mutu.	5	6	0	11
4	Keberlanjutan Manfaat	7	4	0	11
Jumlah		23	21	0	44
Rata-Rata		5	6	0	11
Persentase		45,5%	<b>54,5%</b>	0	100%
Kategori		<b>BAIK</b>			

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2016

Berdasarkan pada tabel IV.26 tentang rekapitulasi jawaban responden pegawai yang telah memberikan jawabannya baik dalam bentuk angket/kuisisioner dan juga wawancara. Kemudian peneliti akan membandingkan hasil akhir kesimpulan jawaban responden pegawai dengan melakukan analisis komperatif kuantitatif yaitu menganalisa data yang telah terkumpul berupa kalimat – kalimat yang diuraikan secara jelas, membandingkan data yang diperoleh, memberikan tanggapan sebagai peneliti, dengan acuan fakta yang ada dilapangan (empiris) agar dapat diketahui kesimpulan akhir dari penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Bantuan Rumah Layak Huni.

Dapat diketahui rekapitulasi jawaban responden pegawai yang memberikan penilaian terhadap indikator “Didukung Sumber Daya” dari responden pegawai 11 orang, 4 orang menjawab baik, 7 orang menjawab cukup

baik. Indikator “Mekanisme Pelaksanaan” 7 orang menjawab baik, 4 orang menjawab cukup baik. Indikator “Sasaran, Waktu dan Mutu” 5 orang menjawab baik, 6 orang menjawab cukup baik. Dan indikator “Keberlanjutan Manfaat” 7 orang menjawab baik, 4 orang menjawab cukup baik. Rekapitulasi jawaban responden 45,5% menjawab baik dan 54,5% menjawab cukup baik. Kesimpulannya secara keseluruhan jawaban responden pegawai tentang penelitian evaluasi pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni dikategorikan “CUKUP BAIK”.

Selanjutnya untuk melihat rekapitulasi jawaban responden masyarakat dapat dilihat pada taembl IV.27 dibawah ini:

Tabel IV.27: Rekapitulasi Tanggapan Responden(Masyarakat) Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Didukung Sumber Daya	24	72	10	106
2	Mekanisme Pelaksanaan	55	49	2	106
3	Sasaran, Waktu dan Mutu.	38	66	2	106
4	Keberlanjutan Manfaat	58	47	1	106
Jumlah		175	234	15	424
Rata-Rata		44	58	4	106
Persentase		41,5%	<b>54,7%</b>	3,8%	100%
Kategori		<b>CUKUP BAIK</b>			

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2016

Sedangkan dari jawaban responden masyarakat selaku penerima bantuan RLH dapat diketahui rekapitulasi jawaban responden masyarakat yang memberikan penilaian terhadap indikator “Didukung Sumber Daya” dari

responden masyarakat 106 orang, 24 orang menjawab baik, 72 orang menjawab cukup baik, dan 10 orang menjawab kurang baik,. Indikator “Mekanisme Pelaksanaan” 55 orang menjawab baik, 49 orang menjawab cukup baik, 2 orang menjawab kurang baik,. Indikator “Sasaran, Waktu dan Mutu” 38 orang menjawab baik, 66 orang menjawab cukup baik, 2 orang menjawab kurang baik,. Dan indikator “Keberlanjutan Manfaat” 58 orang menjawab baik, 47 orang menjawab cukup baik, 1 orang menjawab kurang baik,. Rekapitulasi jawaban responden masyarakat yaitu 41,5% menjawab baik, 54,1% menjawab cukup baik dan 3,8% menjawab kurang baik,. Kesimpulannya secara keseluruhan jawaban responden masyarakat tentang penelitian evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni dikategorikan “CUKUP BAIK”.

Tabel IV.28: Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Tentang Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		B	CB	KB	
1	Didukung Sumber Daya	28	79	10	117
2	Mekanisme Pelaksanaan	62	53	2	117
3	Sasaran, Waktu dan Mutu	43	72	2	117
4	Keberlanjutan Manfaat	65	51	1	117
Jumlah		198	255	15	468
Rata-Rata		49	64	4	117
Persentase		41,8%	<b>54,7%</b>	3,5%	100
Kategori		<b>CUKUP BAIK</b>			

Sumber : Data olahan lapangan tahun 2016

Dari tabel IV.28 diatas, 41,8% jawaban responden Baik, 54,7% jawaban responden cukup baik dan 3,5% jawaban responden kurang baik. Maka

kesimpulannya secara keseluruhan jawaban responden masyarakat dan pegawai tentang penelitian evaluasi program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni dikategorikan “**CUKUP BAIK**” yaitu sebesar **54,7%**.

#### **1.5. Hambatan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni**

Berdasarkan hasil survey melalui kuisioner kepada masyarakat Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Kampar tentang bantuan rumah layak huni antara lain: Hambatan pembentukan organisasi pelaksanaan, hambatan pendanaan, hambatan jarak tempuh dan ketersediaan bahan pembangunan, hambatan teknis pembangunan rumah, dan terakhir adalah hambatan lemahnya pengawasan. Adapun secara rinci hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar yaitu:

1. Hambatan minimnya anggaran dalam Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar membuat program ini kurang maksimal. Dengan minimnya anggaran, proses pembangunan rumah layak huni tidak berjalan dengan yang ada dalam Prosedur Operasional Baku (POB).
2. Hambatan jarak tempuh tempat pembangunan, dan ketersediaan bahan dalam pembangunan rumah layak huni. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki menyebabkan proses pembangunan memakan waktu yang cukup lama.

3. Hambatan teknis pembangunan rumah; berkaitan dengan bahan atau material bangunan yang cukup mahal harganya sehingga pembelian bahan lebih sering dibawah standar yang ditetapkan. Kemudian karena aksesibilitas yang sulit, kadang kadang hanya dapat dilalui melalui roda dua saja, sehingga penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Hambatan lemahnya proses pengawasan dalam pelaksanaan program baik dalam proses penyaluran dana maupun dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Mekanisme pengawasan juga tidak dijelaskan secara spesifik didalam Peraturan Bupati Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 dimana Peraturan Bupati inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program.
5. Hambatan belum adanya sinergitas antara Dinas-Dinas terkait dalam meningkatkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan sehingga program tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni yang dilakukan pada penelitian ini adalah “CUKUP BAIK” yaitu sebesar 54,7%. Kesimpulan secara umum penelitian ini adalah keberhasilan Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Bantuan Rumah Layak Huni ditentukan dengan 1) Dukungan Sumber Daya, kecenderungan responden berpendapat masih belum optimal; 2) Mekanisme Pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian dinilai sudah baik; 3) Sasaran, Waktu dan Mutu, pada tahap penyelesaian seringkali tidak tepat waktu dan kurang bermutu, sehingga dinilai masih kurang baik; dan 4) Keberlanjutan Manfaat sudah baik meski belum berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat penerima bantuan.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar yaitu:
  - a. Hambatan minimnya anggaran dalam Program Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kampar membuat program ini kurang maksimal. Dengan minimnya anggaran, proses pembangunan rumah layak huni tidak berjalan dengan yang ada dalam Prosedur Operasional Baku (POB).

- b. Hambatan jarak tempuh tempat pembangunan, dan ketersediaan bahan dalam pembangunan rumah layak huni. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki menyebabkan proses pembangunan memakan waktu yang cukup lama.
- c. Hambatan teknis pembangunan rumah; berkaitan dengan bahan atau material bangunan yang cukup mahal harganya sehingga pembelian bahan lebih sering dibawah standar yang ditetapkan. Kemudian karena aksibilitas yang sulit, kadang kadang hanya dapat dilalui melalui roda dua saja, sehingga penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d. Hambatan lemahnya proses pengawasan dalam pelaksanaan program baik dalam proses penyaluran dana maupun dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Mekanisme pengawasan juga tidak dijelaskan secara spesifik didalam Peraturan Bupati Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 dimana Peraturan Bupati inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program.
- e. Hambatan belum adanya sinergitas antara Dinas-Dinas terkait dalam maningkatkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan sehingga program tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

## **1.2. Saran**

### **1.2.1. Saran Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar**

1. Dikarenakan faktor penghambat ialah minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah, maka anggaran perlu di tingkatkan lagi agar rumah terealisasi dengan baik.
2. Dikarenakan jarak tempuh tempat pembangunan sangat jauh dan sulit terjangkau maka disarankan kepada pemerintah Kabupaten Kampar dapat memberikan fasilitas kendaraan operasional untuk mengantisipasi ketidaktepatan waktu pembangunan, sehingga bisa mempercepat proses pembangunan rumah layak huni.
3. Dalam pengadaan bahan material dan alat-alat bangunan pemerintah bisa membantu dalam pengadaannya. Agar tersalur dengan cepat sehingga tidak menghambat proses pembangunan rumah layak huni.
4. Dalam hal pengawasan Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, agar dapat memberikan umpan balik dalam proses pelaksanaan program, serta menjadi koreksi selanjutnya untuk pengembangan program atau pelaksanaan program yang sejenis. Selain itu juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat, pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa paksaan dari pihak manapun.

5. Untuk kendala belum berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat Perlu adanya kerjasama antar dinas pemerintahan secara terpadu, dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti pembangunan rumah maupun sarana prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi. Kerjasama dinas-dinas tersebut diharapkan bisa maningkatkan setiap komponen tridaya pembangunan perumahan yang berkelanjutan (pemberdayaan fisik, ekonomi, dan sosial) sehingga pelaksanaan program benar-benar mewujudkan perumahan yang berkelanjutan.
6. Tujuan program yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 648/CKTR-SET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni, perlu lebih diperjelas atau dispesifikkan. Karena tujuan tersebut menimbulkan makna bias dan memunculkan harapan yang besar atas pelaksanaan program ini. Dan untuk mengukur tercapainya tujuan program mejadi sulit.
7. Ketepatan kelompok sasaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar 95% tepat sasaran masyarakat miskin dan 55,5% tepat sasaran rumah tidak layak huni, perlu ditingkatkan lagi dengan selalu adanya verifikasi dari pihak Pemerintah Desa, Kecamatan maupun tokoh masyarakat setempat, agar pelaksanaan program ini selalu tepat sasaran.
8. Perlunya dilakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni. Pemberdayaan fisik dan sosial yang dilakukan tanpa pemberdayaan ekonomi bisa menyebabkan masyarakat merasakan

kesulitan dalam perawatan rumah pasca pelaksanaan program tersebut. Apabila penghuni dari rumah-rumah yang telah menjadi rumah layak huni tersebut tidak bisa melakukan perawatan terhadap rumahnya, rumah tersebut bisa kembali menjadi rumah tidak layak huni. Karena itu pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai program dampingan, agar ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga dapat merawat kondisi rumahnya secara berkelanjutan.

#### **5.2.2. Saran Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni**

Pembangunan bantuan rumah layak huni di Kabupaten Kampar, Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masih dijumpai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni serta melihat arti penting pelaksanaan program bantuan rumah layak huni bagi permasalahan perumahan di Kabupaten Kampar bagi masyarakat miskin, maka studi lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan program ini adalah:

1. Studi efektifitas dan efisiensi peran kelembagaan dalam program pembangunan rumah layak huni.
2. Studi alternatif bentuk kerjasama program bantuan rumah layak huni dengan lembaga di luar pemerintahan.
3. Studi alternatif pembiayaan pembangunan perumahan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Anderson, Dalam Prof. Drs. Budiwinarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Cetakan Kedua.
- Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Cristine dan Kansil, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Askara.
- Danim, Sudarwan, 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Edisi Pertama*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Dunn. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Istiana, 2011, *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. B2P3KS PRESS, Yogyakarta.
- Jones, Carles, 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kaho Jusuf Riwu, 2005, *Otonomi...*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil dan Crhstine, 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Koryati, Nyimas Dwi, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta. YPAPI.
- Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Teori Budaya Organisasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Banten: SiraoCredentia Center.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang*. Jakarta, Gramedia.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, 2010. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia.
- Riant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta, PT. Alex Media.
- Ryaas Rasyid, 2002, *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Siagian, P Sondang, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soehino, 2002, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suradinata Ermaya, 2002, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*, Bandung, Ramadhan.
- Suradi dan Mujiadi. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Lima Provinsi*. Departemen Sosial RI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Syafiie Inu Kencana, 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Tama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Rafika Aditama. Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 648/CKTR-ET/2015/937 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2015.

### **Dokumentasi:**

<http://www.depdagri.go.id>.

[www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org), diakses tanggal 22 Oktober 2015

Rakor Penanggulangan Kemiskinan, 2012.

Departemen Pertanian RI, 1996, *Pedoman Umum Ketahanan Pangan*, Jakarta.

Departemen Sosial RI. 2006. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Direktorat Pemberdayaan Sosial, Jakarta